

MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK:

Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak



Menuju Indonesia Layak Anak:

Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak

Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak

Copyright ©2018 Yayasan Wahana Visi Indonesia
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Cetakan ke-1; 2018

Editor: Alex Japalatu

Desain Layout: Yudadi BM Tri Nugraheny

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Sampul: Anak-anak di Kabupaten Lanny Jaya, Papua

Foto: Adi Hutomo

Kontributor:

- Timotius Winner (Bengkayang) • Nurul Hidayah (Jakarta)
- Nurring Trisnowati (Sekadau) • Asih Silawati (Jakarta)
- Wangsit Panglipur (Sentani) • Eninofa Rambe (Jayapura)
- Johny Noya (Sikka) • Yosef Avion (Sikka)
- Dokter Michael Bantung (Jayawijaya) • Ignatius Anggoro (Landak)
- Supriadi Saiman (Singkawang) • Daniel Tamba (Bengkayang)
- Simson Otniel (TTU) • Setyo Lesmono (Parigi Moutong)
- Astriyana Telumbanua (Parimo) • Tira Maya Malino (Jakarta)
- Nurhasanah (Singkawang) • Ni Wayan Niniek Apriani (Singkawang)
- Willy Sitompul (Jakarta) • Nurul Hidayah (Jakarta)

Proofreader dan reviewer:

Maria J. Adrijanti, Nurman Siagian, Regina Veronica, Tira Maya Maisesa Malino,
Margareththa Siregar

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia, Wahana Visi

Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak
Anak/

oleh Indonesia, Wahana Visi;

- Cet. I.

146 hlm.; 21 cm

I. Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak
2. Wahana Visi Indonesia

I. Judul II. Indonesia, Wahana Visi



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA

SAMBUTAN BUKU “MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK”

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak**

Seperempat abad sudah Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia.

Dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada KHA, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita melaksanakan dan menghormati KHA. Untuk melaksanakan KHA tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, diwajibkan mensosialisasikan KHA tersebut kepada semua pihak sampai kepada anak. Dalam implementasinya pun harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Hal ini mempertegas pernyataan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta UUD 45. KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Perintisan KLA sudah dimulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 kabupaten/kota, dan pada tahun 2017 telah mencakup 126 kabupaten/kota. Tahun 2018 ini ada 177 kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak.

Pemerintah Indonesia menjadi salah satu *pathfinding partners* dalam kemitraan global untuk penghapusan kekerasan terhadap anak (*Global Partnership to End Violence Against Children*). Penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap anak yang juga menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkhusus TPB 16.2 untuk menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

Buku *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak* semoga bisa mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang sejalan dengan program PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau TPB pada tahun 2030. Kita masih punya waktu sekitar 15 tahun ke depan. Semoga ada perubahan dengan adanya program-program yang kita lakukan salah satunya KLA. Kita akan wujudkan *child friendly country*.

Jakarta, September 2018

CEO dan Direktur Nasional Yayasan Wahana Visi Indonesia



Dr. Doseba T. Sinay, MBA.

**SAMBUTAN BUKU “MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK”
WAHANA VISI INDONESIA (WVI)**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku “MENUJU INDONESIA LAYAK ANAK”. Buku ini merupakan kumpulan praktik cerdas dari kisah inspiratif dan praktik cerdas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta di tingkat nasional dan daerah dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Hal ini lahir dari pembelajaran di tengah tantangan dan ketertinggalan pembangunan di sebagian besar wilayah pedalaman Indonesia, namun masyarakat telah berbuat banyak untuk kepentingan terbaik anak. Berasal dari kearifan lokal dan disesuaikan dengan konteks masing masing daerah, berbagai praktik cerdas ini sangat memungkinkan untuk direplikasi.



Sebagai yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan untuk anak dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan agama, ras etnis dan jenis kelamin, Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan sejumlah upaya dalam mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal dalam tataran kebijakan dan program pro-anak melalui Kota/Kabupaten Layak Anak bersama pemerintah dan masyarakat di wilayah dampingan. Upaya tersebut diantaranya di bidang pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi di 59 titik di 13 provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2017, di tingkat nasional, WVI turut memfasilitasi keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA); Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA); dan memberikan masukan terhadap revisi indikator KLA, khususnya pada klaster Tumbuh Kembang Anak. Di tingkat daerah, WVI telah ikut memfasilitasi berbagai sesi pengembangan kapasitas daerah dalam memahami KLA, mendeklarasikan komitmen daerah menuju KLA, membangun gugus tugas dan rencana aksi, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa. Sekurangnya sudah ada 8 provinsi, 22 kabupaten/kota, 29 kecamatan/desa/kelurahan, di wilayah dampingan WVI yang telah mendeklarasikan komitmen menuju layak anak. Sejumlah 41 Peraturan Daerah dan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan/atau KLA telah difasilitasi pengembangannya. Sejumlah 213 Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan telah didampingi pembentukan dan keaktifannya sebagai salah satu unsur kekuatan KLA.

Pengalaman dari lapangan ini menjadi salah satu wujud nyata dari *visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya; doa kami bagi setiap hati, tekad untuk mewujudkannya*. Dari sekian banyak kisah inspiratif,



cerita praktik cerdas dipilih berdasarkan beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya adalah kriteria pada indikator KLA, memiliki pendekatan inovatif, partisipatif, pengintegrasian sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, keberlanjutan dalam kebijakan atau strategi pembangunan daerah, akuntabel, transparan kepada publik, berpihak kepada masyarakat miskin serta sudah menunjukkan perubahan positif yang secara nyata dialami oleh masyarakat.

Kiranya berbagai kisah inspiratif dan kumpulan data yang dimuat di dalam buku ini dapat berkontribusi bagi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi sejumlah intervensi berbasis bukti di konteks wilayah masing-masing dan memicu lebih banyak aksi inovatif dan kreatif dari berbagai kalangan dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030. Lebih dari itu, kiranya buku ini juga dapat menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan anak secara global dalam agenda pembangunan global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan; SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Jakarta, September 2018

DAFTAR ISI

- 3 Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA
- 6 Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Visi Indonesia Dr. Doseba T. Sinay, MBA.
- 9 Daftar Isi
- 11 Sekilas mengenai Kota/Kabupaten Layak Anak
- 12 Kriteria Praktik Cerdas WVI
- 15 Praktik Cerdas dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Program MTBSM Demi Anak Papua Sehat
- 27 Praktik Cerdas dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat Perdes Demi Masa Depan Anak-Anak Pawis Hilir
- 37 Praktik Cerdas dari Kabupaten Parigi Muntong, Sulawesi Tengah PAUD Holistik Integratif Darma Bhakti Sekolah Rujukan di Parigi Moutong
- 47 Praktik Cerdas dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Mior Dadin Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sikka
- 59 Praktik Cerdas dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Perdes Yang Pro Anak dan Perempuan
- 69 Praktik Cerdas dari Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat Foranchikha Pejuang Cilik Dari Zamrud Katulistiwa
- 79 Praktik Cerdas dari Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT Skol Amnasit Ketika Orang Tua “Bersekolah” Demi Anak-Anak Mereka
- 91 Praktik Cerdas dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tak Ada Lagi BAB di Sungai dan Kebun
- 101 Praktik Cerdas dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat Sekolah Harmoni Hijau Singkawang

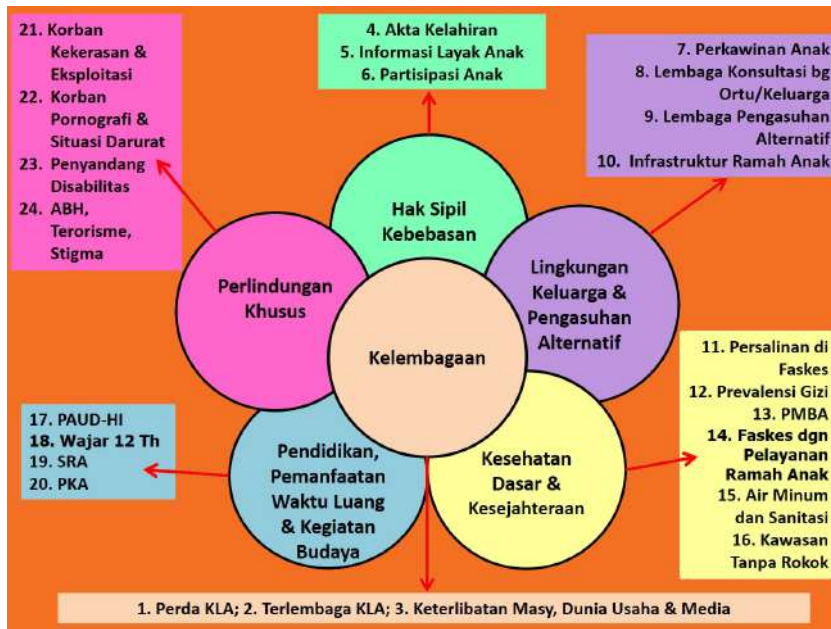


- I 13 Praktik Cerdas dari Kabupaten Surabaya, Jawa Timur
Child Friendly Resilient City (CFRC) Penanggulangan Bencana Berbasis Sekolah dan Masyarakat
- I 25 Praktik Cerdas dari Kabupaten Jayapura, Papua
Mengajak Korporasi Mewujudkan Kota Layak Anak
- I 33 Praktik Cerdas dari Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta
Kampung Terpadu Ramah Anak (KTRA) Menuju Kecamatan Penjaringan Layak Anak
- I 43 Sekilas tentang WVI
- I 44 Wilayah Program Wahana Visi Indonesia
- I 46 Visi WVI

Sekilas Mengenai Kota/Kabupaten Layak Anak

Kota/kabupaten layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Melalui komitmen Kota/Kabupaten Layak Anak, terdapat turunan Konvensi Hak Anak yang menjabarkan secara rinci tentang hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster substantif, yaitu:



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia - www.kla.id

Kriteria Praktik Cerdas

Wahana Visi Indonesia mencoba menawarkan kisah-kisah dari lapangan mengenai kebijakan dan kegiatan pro-anak yang berhasil di suatu wilayah. Bukan berarti membandingkan upaya ini adalah pilihan yang terbaik dari upaya lainnya. Lebih dari itu, kami ingin berbagi cerita yang kerap kali lupa untuk dipublikasi bahkan tidak dikenali orang lain. Inilah kumpulan cerita yang terdokumentasi untuk menjawab tantangan yang sama, pelibatan masyarakat sipil dan pemerintah daerah serta nilai-nilai yang berakar pada kearifan lokal.



Di balik setiap kesuksesan selalu terdapat hambatan dan kegagalan di dalamnya. Melalui buku ini, setiap orang bisa mengimplementasikannya, meminimalisasi kesalahan yang sama, bahkan mereplikasikannya dengan bentuk yang lebih baik lagi.

Kumpulan kisah praktik cerdas ini diberikan dengan tujuan memotivasi pembuat kebijakan dan komunitas untuk dapat saling belajar dari keberhasilan kebijakan pro-anak dan tetap melakukan inovasi dalam mencapai kota/kabupaten layak anak.

Praktik baik ini dipilih berdasarkan kriteria berikut.



Menjawab Indikator Kota/ Kabupaten Layak Anak

Menyasar lebih dari dua indikator KLA dan lintas sektor

Kerja Sama

Pengintegrasian sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha



Dampak Nyata

Perubahan positif yang secara nyata dialami oleh penerima manfaat

Inovatif

Inisiatif berbeda dari yang pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan/atau strategi kreatif yang praktis



Partisipatif

Adanya keterwakilan masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Akuntabel

Transparan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan

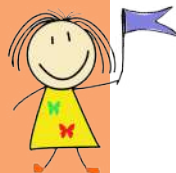
Berlanjut

Kegiatan yang telah dilakukan mampu meneruskan dan meningkatkan hasil yang sudah dicapai dan tertuang dalam kebijakan atau strategi pembangunan daerah

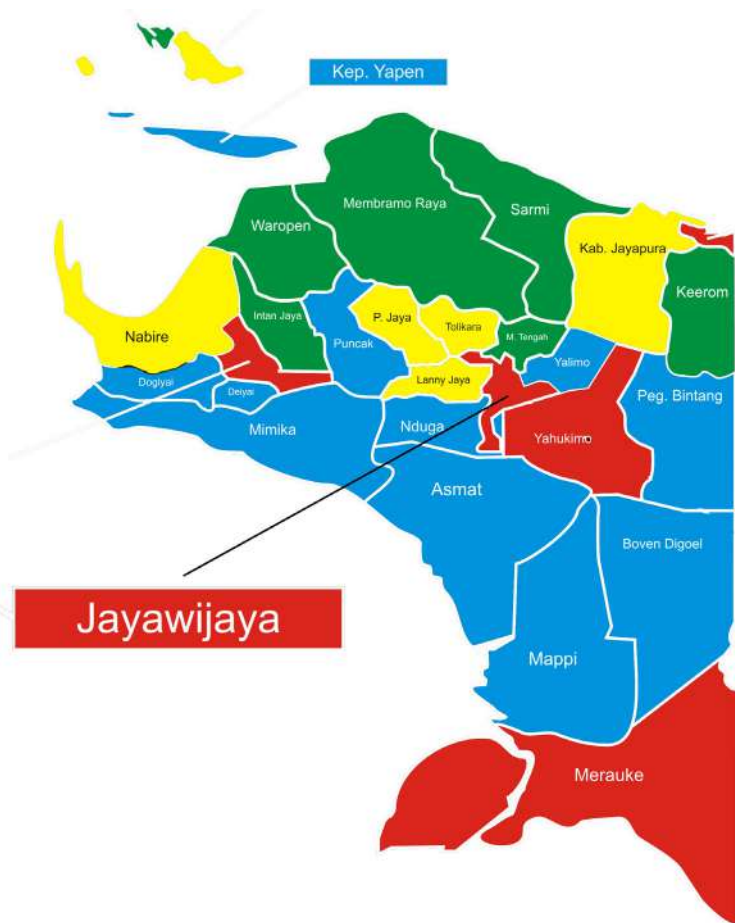


Berpihak kepada masyarakat miskin

Manfaat bagi masyarakat miskin, berdampak, dikerjakan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, mengupayakan perdamaian dan pemeliharaan lingkungan







“ ... Ini adalah kali pertama saya ke Papua, dan bisa bertemu langsung dengan anak-anak Wamena. Melihat anak-anak di sini, saya menyadari bahwa mereka sungguh butuh uluran tangan kita supaya mereka mengenyam pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka.”

Chelsea Islan
Aktris
Ambassador #BeraniMimpi 2017 –
Wahana Visi Indonesia.

Praktik Cerdas dari Kabupaten Jayawijaya, Papua

Program MTBSM

Demi Anak Papua Sehat



Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBSM) adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya bersama Wahana Visi Indonesia dan UNICEF untuk menyelamatkan dan memenuhi hak anak sejak dini. Program ini telah direplikasi ke Kabupaten Jayapura dan Biak.



Minimnya tenaga kesehatan dan sulitnya akses karena hambatan geografis menjadi persoalan klasik kesehatan di Papua. Sebagian besar warga masih tinggal di pedalaman. Jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan. Karena itu, warga sangat rentan terhadap kematian karena sukar mengakses puskesmas.

Angka Kematian Balita (AKB) di seluruh Papua mencapai 54 anak per 1.000 kelahiran hidup seperti dilansir Dinas Kesehatan Provinsi Papua (data 2013). Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 575 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini tertinggi di Indonesia (Sumber: www.dinkes.papua.go.id).

Menunggu sampai akses bisa dijangkau dan sumber daya tercukupi sama dengan membiarkan anak-anak terancam hak hidupnya. Maka perlu inovasi yang menjawab situasi dan kondisi di atas.

Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya menjalin kerja sama dengan WVI dan UNICEF guna melakukan program inovasi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Dipilih program inovasi yang mereka namakan Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat atau disingkat MTBSM.

Menunggu sampai layanan kesehatan mudah dijangkau dan sumber daya tercukupi sama dengan membiarkan anak-anak terancam hak hidupnya.



Pengembangan MTBSM sebagai Model Intervensi

“Dimulai tahun 2010 silam melalui REACH proyek–kolaborasi antara Pemda Jayawijaya, WVI, dan UNICEF–MTBSM diuji coba dan diimplementasikan pada 6 puskesmas sebagai wilayah intervensi, yaitu Puskesmas Assolokobal, Puskesmas Kurulu, Puskesmas Assologaima, Puskesmas Wollo, dan Puskesmas Yalengga,” kata Dokter Maria J.Andri-janti, Health Team Leader, WVI.

Inti program MTBSM adalah warga setempat dilatih sebagai kader kesehatan untuk dapat melakukan tindakan pengobatan (kuratif) terbatas jika ada anak balita yang sakit di sekitar mereka.

“Bisa dibilang tindakan pertolongan pertama terutama bagi anak balita dan ibu hamil,” katanya.



Sarah Uaga, Kader MTBSM dampingan WVI sedang menjelaskan tanda-tanda kesakitan awal pada bayi dan balita. (Dokumentasi WVI Jayawijaya)



Menurut Dokter Michael Bantung, Maternal Child Health and Nutrition (MCHN) Specialist Papua Zone WVI, sejak dilahirkan anak sudah harus mendapatkan asupan gizi yang baik, imunisasi rutin, dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang optimal.


“MTBSM adalah salah satu program inovasi yang menjawab hak anak di usia balita untuk mendapatkan akses kesehatan yang cepat, tepat dan fasilitas rujukan jika dibutuhkan,” ujarnya.

Inovasi yang dimaksud adalah kader kesehatan yang dipilih dari warga untuk dapat melakukan pertolongan pertama. Kampung yang dipilih sebagai sasaran program minimal berjarak dua jam berjalan kaki dan tidak punya tenaga kesehatan. Dari setiap kampung dipilih beberapa kader.

Syaratnya adalah bersedia dilatih, bisa membaca dan menulis. “Rata-rata memang hanya lulus SD atau SMP. Beberapa lulus SMA dan kejar paket C. Bagi kami tidak jadi soal karena mereka antusias sekali mengikuti pelatihan,” kata Michael.

Perlu tahapan untuk memastikan bahwa kader mampu melakukan tata laksana MTBSM ini. Karena itu, pelatihan rutin digelar. Pelatihan tahap pertama selama empat hari membahas peran kader, cara berkomunikasi dan cara melihat tanda-tanda kesakitan awal pada anak. Pelatihan ini dilanjutkan dengan “magang” di puskesmas untuk implementasi dan supervisi, sebelum pelatihan tahap dua dilakukan.

Inti program MTBSM adalah warga setempat dilatih sebagai kader kesehatan untuk dapat melakukan tindakan pengobatan (kuratif) terbatas jika ada anak balita yang sakit di sekitar mereka



Kader Kompeten

- Mengenali ada tidaknya tanda bahaya pada balita kader perlu didampingi lebih untuk bisa sampai kompeten kader perlu didampingi secara serius dan berpotensi bisa dimagangkan lebih lama lagi di puskesmas
- Bisa melakukan terapi batuk, demam dan mencret
- Mampu memutuskan untuk melakukan rujukan jika ada satu saja dari beberapa tanda bahaya

Kader Butuh Pendampingan

Kader perlu didampingi lebih untuk bisa sampai kompeten

Kader Butuh Pendampingan Intensif

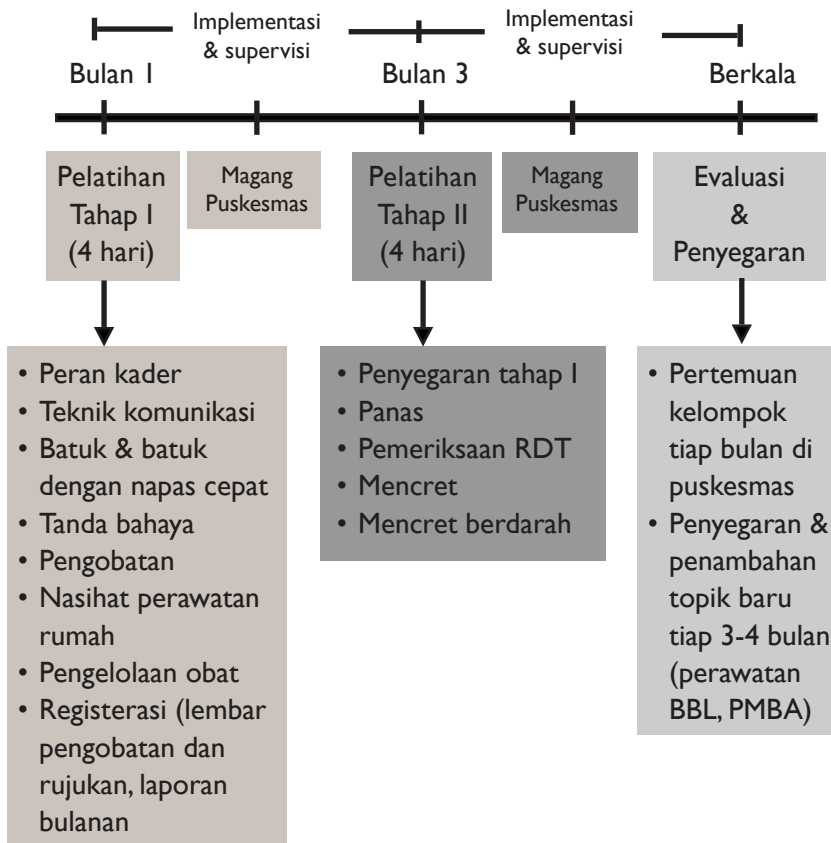
Kader perlu didampingi secara serius dan berpotensi bisa dimagangkan lebih lama lagi di puskesmas

Satu orang tenaga kesehatan di puskesmas yang sudah terlatih Manajemen Terpadu Balita Sakit ditunjuk sebagai *supervisor* atau penyelia kader MTBSM dalam memastikan *reporting* kader, logistik obat dan ketepatan dalam mengenali dan mengklasifikasi penyakit sehingga sistem pendukung supervisinya bisa berjalan baik.

“Setelah pelatihan pertama dan kedua serta supervisi dilakukan, kader masih terus dilengkapi dengan pelatihan rutin setiap tiga-empat bulan sekali. Supervisi terus dilakukan, supaya ingat apa yang harus dilakukan,” jelas Michael.



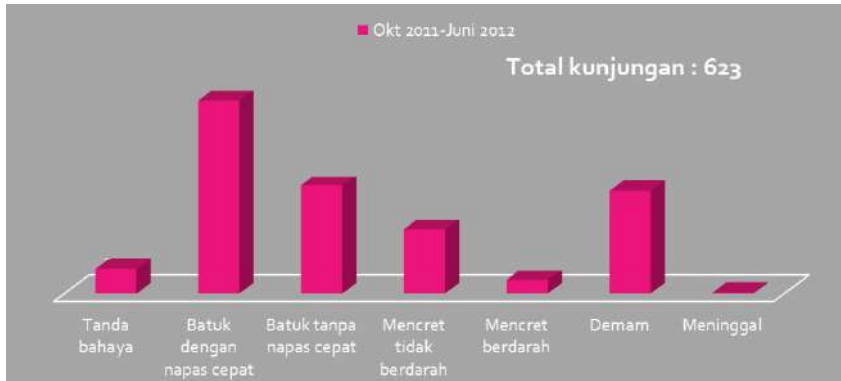
Mekanisme Pelatihan MTBS-M Kader



Setelah berjalan selama tiga tahun, MTBSM di Kabupaten Jayawijaya telah memberikan dampak positif bagi bayi dan balita. Para kader yang dilatih bisa melakukan pertolongan pertama kepada bayi dan balita yang mengalami tanda-tanda kesakitan awal. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah bayi yang telah dibantu oleh para kader.



Tanda Kesakitan Awal yang Ditolong



Sumber: Laporan Program MCHN Zone Papua

Informasi di atas menegaskan bahwa tantangan terkait akses dan SDM, bisa dijawab oleh masyarakat itu sendiri, dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif.

Hasil dari Jayawijaya ini juga memberikan advokasi sampai pada level Nasional yaitu kepada Kementerian Kesehatan, hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.70 tahun 2013, untuk melindungi Kader Kesehatan secara legal dalam melakukan praktik tata laksana MTBSM dalam masyarakat.

Program MTBSM ini dilanjutkan WVI bersama Dinkes Kabupaten Jayawijaya sampai dengan Juni 2017. Hingga sekarang, setahun setelah WVI tidak lagi menangani program ini, Dinas Kesehatan Jayawijaya tetap melanjutkannya.



Replikasi Program

Melihat isu yang sama di wilayah pesisir Papua, WVI, dan UNICEF melanjutkan kolaborasinya dengan mereplikasi Program MTBSM ke Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak pada tahun 2017. Kali ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua ikut ambil bagian di dalamnya. Kabupaten Jayapura memfokuskan diri pada enam puskesmas. Masing-masing puskesmas memilih dua kampung. Sementara Kabupaten Biak memilih empat puskesmas dengan jumlah kampung yang sama.

“Tujuan utama di Jayapura dan Biak adalah menciptakan fasilitator MTBSM di tingkat Provinsi Papua. Sehingga ketika ada kebutuhan dari kabupaten-kabupaten di seluruh Papua dengan isu yang sama, Dinkes Provinsi sudah mempunyai fasilitator untuk memfasilitasi pelatihan dan pendampingan di kabupaten tersebut,” jelas Michael.

Menurutnya, program MTBSM ini sangat membantu peningkatan kapasitas baik kader kesehatan maupun tenaga kesehatan, sehingga mereka sangat mumpuni dalam melakukan pertolongan pertama kepada bayi dan balita terkait penyakit diare, pneumonia dan demam (malaria) di kabupaten dan kampungnya masing-masing.

Hasil dari Jayawijaya juga memberikan advokasi sampai pada level Nasional yaitu kepada Kementrian Kesehatan, hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.70 tahun 2013, untuk melindungi Kader Kesehatan secara legal dalam melakukan praktik tata laksana MBSM dalam masyarakat.

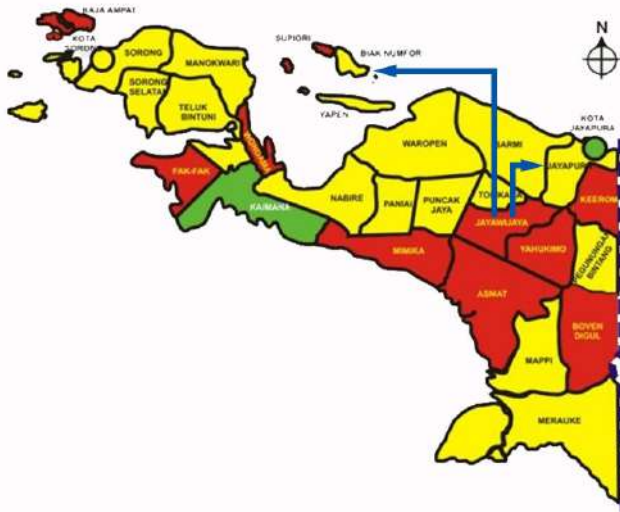


Pendampingan dan pelatihan yang teratur kepada para kader kesehatan menjadi cara untuk semakin meningkatkan kemampuan mereka. (Dokumentasi WVI Jayawijaya)

“Dalam semester 2 tahun 2018 ini kami akan mendokumentasikan dampak langsung Program MTBSM bagi anak balita. Hal ini menjadi salah satu perhatian pelayanan WVI di Kabupaten Jayapura dan Biak,” kata Michael.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg. Aloysius Giyai mengakui bahwa Program MTBSM sangat bermanfaat dan kontekstual dengan kondisi masyarakat yang tinggal di pegunungan maupun pesisir pantai.

“Karena kader kesehatan dilengkapi dengan pengetahuan untuk melihat tanda-tanda kesakitan awal pada balita dan ibu hamil. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengambil tindakan sementara sebelum dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya.



Tahun 2017, kata Giyai, Angka Kematian Balita (AKB) mengalami penurunan. Dari data tahun 2013 bahwa 54 per 1.000 kelahiran hidup, dalam kurun waktu 4 tahun turun menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup. Angka gizi buruk juga mengalami penurunan dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen. Cakupan imunisasi meningkat dari 57,5 persen menjadi 67 persen.



Laporan Tahunan Dinkes Papua (www.dinkes.papua.go.id)



“Ini berarti program kesehatan yang dilakukan di Papua berada di jalan yang benar,” kata Giyai.



Demina Uga (memeriksa bayi), kader dampingan WVI dari Puskesmas Wollo sedang belajar menghitung “nafas cepat” dari bayi dengan memakai timer. (Dokumentasi WVI Jayawijaya)

Bagi WVI sendiri, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga sosial lain akan terus dilakukan demi memenuhi hak-hak dasar anak di Papua.

“Itu sebabnya sejak membuka program ini, kami selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga secara teknis mereka sudah bisa terfasilitasi. Dan lebih penting lagi pemerintah bisa menyiapkan anggaran untuk kelanjutannya ketika lembaga seperti WVI mengakhiri programnya di sana,” kata Michael.***



“Kami menggali dan mengidentifikasi isu anak di Sekadau baik dari sisi perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi. Supaya pemerintah dan masyarakat mendengar. Lebih dari itu kami juga menawarkan solusi.”

Sarah, 17 tahun,
Forum Anak Sekadau Kalimantan Barat
(Disampaikan pada pertemuan gugus tugas KLA Sekadau
menuju Kabupaten Layak Anak,
Mei 2018)

Praktik Cerdas dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Perdes Demi Masa Depan Anak-Anak Pawis Hilir



Desa Pawis Hilir terletak di Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dari Jelimpo perjalanan ditempuh selama sejam dengan kendaraan bermotor. Kini Pawis Hilir sedang berbenah diri menuju Desa Layak Anak.

“Mula-mula warga dan pemerintah desa hanya mengatur lima hal saja, yakni anak tidak boleh dipukul atau dicubit, ada tempat bermain bagi mereka, anak usia 0-5 wajib masuk PAUD, jam belajar anak didampingi orang tua, dan tidak ada lagi pernikahan usia dini,” kata Ignatius Anggoro, AP Manager WVI Landak. Beberapa kesepakatan ini belakangan dituangkan menjadi pasal-pasal dalam Peraturan Desa.



PAUD Dibangun

Ketika melakukan analisis sosial pada tahun 2011, kata Anggoro, pemerintah desa dan warga Pawis Hilir menyadari hanya sedikit anak yang tamat SD. Berarti hambatan utama mereka adalah dalam bidang pendidikan.

Salah satu alasan anak-anak tidak melanjutkan sekolah adalah membantu orang tua mereka menderes getah karet. Sebagian besar warga Pawis Hilir adalah petani karet. “Pada analisis awal, kami juga menemukan bahwa anak-anak dididik dengan kekerasan. Dipukul, ditampar, dicubit, diteriaki dengan alasan disiplin,” kata Anggoro.

Pada tahun 2012, pemerintah desa dan masyarakat Pawis Hilir sebenarnya sudah merintis lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama PAUD Holistik Integratif Tunas Mekar.



Pengembangan kapasitas Forum Anak Desa Pawis oleh WVI (Dokumentasi WVI AP Landak)



Waktu itu belum ada PAUD. “Kami (WVI) mulai mendampingi mereka pada tahun 2012. Kami berdiskusi dengan warga dan pemerintah desa tentang pentingnya PAUD dan memberikan hak pendidikan kepada anak sejak usia dini. Dalam setiap pertemuan kami selalu melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat,” jelas Anggoro.

Gayung bersambut. Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Landak menerima baik rencana ini. Bahkan mereka mengusulkan selain PAUD agar dikembangkan juga posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita). Tiga hal tersebut bisa berjalan sekaligus dan saling terintegrasi. Harapannya, kebutuhan anak akan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan dapat terpenuhi.



Pelatihan ekstensif untuk mengembangkan SDM kader (Dokumentasi WVI AP Landak)

Karena pengalaman yang ekstensif dalam pengembangan kapasitas SDM termasuk di dalamnya pelatihan kader, maka WVI dipercayakan untuk melatih kader PAUD, posyandu, dan BKB. Pemerintah daerah juga



turut terlibat aktif di dalamnya. Selain pelatihan, *monitoring* kehadiran ibu bayi dan balita ke posyandu diperlukan secara berkala dengan memantau status kesehatan mereka. “Kami bekerja sama dengan para kader dan puskesmas,” ujar Anggoro.

Diakui Anggoro bahwa masyarakat Desa Pawis Hilir belum memiliki pemahaman tentang cara mengasuh anak dengan baik sebelum PAUD HI berdiri. Warga belum paham mengapa anak harus dibawa ke posyandu setiap bulan, ditimbang berat badannya dan diperiksa kesehatannya. Warga juga belum memahami cara memberi asupan gizi seimbang kepada bayi dan balita.

Dari Kesepakatan ke Perdes

Warga Desa Pawis Hilir mengambil langkah besar ketika peresmian PAUD Tunas Mekar. Mereka membuat kesepakatan bahwa Pawis Hilir akan menjadi Desa Ramah Anak (untuk menuju Desa Layak Anak). Kesepakatan ini kemudian dikembangkan menjadi Peraturan Desa Pawis Hilir mengenai Perlindungan Anak (Perdes PA).

Perdes PA disusun bersama-sama antara pemerintah desa, warga, dinas-dinas, dan WVI sebagai fasilitator. Tujuannya untuk memastikan terpenuhinya setiap aspek hak anak. Penyusunan Perdes PA didampingi BP3AKB Kabupaten Landak. Lima kesepakatan pertama dikembangkan menjadi beberapa pasal dan dituangkan ke dalam Peraturan Desa.

Hasilnya antara lain: semua anak wajib masuk PAUD, wajib belajar 12 tahun, wajib posyandu bagi balita dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan anak. Orang tua diwajibkan mengurus akta lahir anak mereka, melindungi anak dari kekerasan, menolak pernikahan dini dan melindungi anak dari penyalahgunaan napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).



Pawis Hilir akan menjadi Desa Ramah Anak (untuk menuju Desa Layak Anak). Kesepakatan ini kemudian dikembangkan menjadi Peraturan Desa Pawis Hilir mengenai Perlindungan Anak (Perdes PA).

Partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait termasuk dukungan masyarakat berhasil mereduksi hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian Perdes. Diskusi yang cukup memakan waktu hanya pada poin pernikahan dini. Pada awalnya tokoh adat dan pemerintah desa akan memberikan hukuman sosial

bagi orang tua dengan “hanya” tidak akan menghadiri undangan pernikahan anak tersebut. Tetapi setelah mempertimbangkan dampak negatif dan kerugian pernikahan dini bagi anak-anak, akhirnya para tokoh adat sepakat untuk melarang pernikahan anak.



Foto bersama Kades Pawis, WVI dan BP3AKB setelah Perumusan Perdes PA (Dokumentasi WVI AP Landak)



Karena Perdes ini, menurut Anggoro, sebagian besar orang tua memasukkan anak ke PAUD. Tingkat pernikahan dini juga menurun drastis. Jika dahulu setiap tahun lebih dari lima pernikahan dini, maka sejak Perdes PA diresmikan hingga tahun 2017 hanya ada dua peristiwa pernikahan dini. “Tahun 2018 belum ada pernikahan anak,” cetus Anggoro.

Kekerasan fisik terhadap anak juga hampir tidak ada lagi. Dulu orang tua sering memukul anak dengan alasan mendisiplinkan anak. “Seluruh masyarakat sudah mengetahui hak-hak anak. Sejak Perdes PA diresmikan, banyak program pembangunan mengalir ke desa. Perubahan bisa terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak semakin meningkat. Rasa tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka jauh meningkat,” jelas Anggoro.

Sejak Perdes PA diresmikan, banyak program pembangunan mengalir ke desa. Perubahan bisa terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak semakin meningkat.

Salah satu bentuk perubahan desa ini juga ditandai dengan terbentuknya Forum Anak Desa Pawis Hilir. Forum Anak memiliki program pembinaan kesenian tarian untuk anak usia SD dan remaja, serta kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Selain itu, jam belajar anak di luar sekolah juga disepakati mulai pukul 18.00-19.30 WIB dan orang tua atau pengasuh wajib mendampingi anaknya belajar.



“Masyarakat menyadari bahwa mereka selama ini kurang memperhatikan jam belajar anak. Mereka akhirnya sangat mendukung dimasukkannya jam belajar anak ke dalam Perdes PA,” kata Anggoro.

Selain melalui PAUD HI dan Perdes PA, pemerintah desa dan masyarakat juga mengusahakan pembangunan di berbagai aspek termasuk akses pendidikan di tingkat lanjutan yaitu SMP. Komitmen mereka terwujud lewat pendirian SMP di Desa Pawis Hilir di tahun 2014. Sebelum tahun 2014, belum ada SMP di desa. Sehingga anak-anak yang lulus SD harus berjalan kaki sekitar 22km ke Kota Ngabang untuk melanjutkan studi.

Sekarang, semua anak usia sekolah di Desa Pawis Hilir sudah memiliki akses dan melanjutkan pendidikannya. Data BPS Kecamatan Jelimpo Dalam Angka 2016 menyebutkan anak usia 0-19 tahun di Pawis Hilir berjumlah 584 orang. Lewat Perdes PA semua anak memiliki akses layanan baik kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang sesuai jenjang usianya.



Deklarasi KLA Landak oleh PJ Bupati Landak (Dokumentasi WVI AP Landak)



“Perdes itu seperti membuka banyak pintu di Pawis Hilir. Ada banyak hal yang dilakukan warga. Selain SMP, mereka juga mempunyai program pipanisasi dan mengalirkan air ke desa, menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM) dengan membangun jamban agar menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, kebun gizi, dan kebun Tanaman Obat Keluarga(TOGA),” jelas Anggoro.



Bupati Landak Menandatangani Deklarasi KLA (Dokumentasi WVI AP Landak)

Tanaman obat antara lain: jahe, sereh, kumis kucing untuk menyembuhkan penyakit-penyakit pernafasan. Untuk kebun gizi ditanam terong, cabe, tomat, kacang, kangkung, mentimun yang berlokasi di pusat Desa Pawis. Khusus kebun gizi, sebagian besar keluarga sudah mengembangkannya dan hasilnya dapat dinikmati anak dan masyarakat.

Sebelum ada Perdes PA, menurut Anggoro, tidak ada anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA bahkan perguruan tinggi. Tetapi pada tahun 2014, setelah Perdes PA diberlakukan, sekitar 10 anak berhasil melanjutkan studi ke STKIP Pamane Talino di Kota Ngabang.



Buah dari komitmen segenap warga dan pemerintah desa yang berperan aktif dalam mewujudkan Desa Ramah Anak, maka Desa Pawis Hilir memperoleh Juara I Lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Landak tahun 2016.

Upaya menjadikan Desa Pawis Hilir menjadi Desa yang Layak Anak tidak berhenti di situ saja. Pemerintah Desa Pawis Hilir dan warga terus berbenah menuju Desa Layak Anak dengan berupaya maksimal memenuhi hak setiap anak.

Seperti sebuah peribahasa Afrika yang mengatakan: Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Itulah yang dilakukan pemerintah desa dan warga Pawis Hilir, bersatu-padu untuk masa depan anak-anak mereka.***



“Saya berharap pemerintah mau lebih peduli dengan kondisi fasilitas serta infrastruktur di (daerah) pedalaman, khususnya PAUD yang merupakan dasar pendidikan bagi anak-anak. Agar anak Indonesia bisa makin cerdas untuk menjadi pemimpin bangsa.”

*Indra Bekti
Selebriti yang turut mendukung Wahana Visi Indonesia
dalam pembangunan PAUD di Biak (Papua)
dan Sambas (Kalimantan Barat)*

*Praktik Cerdas dari Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah*

PAUD Holistik Integratif Darma Bhakti Sekolah Rujukan di Parigi Moutong



Pendidikan Usia Dini (PAUD) Darma Bhakti, Desa Kotaraya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Parimo sebagai rujukan bagi pengembangan lembaga pendidikan usia dini di seluruh wilayah Parimo. Sekolah ini dinilai telah memenuhi salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) yakni anak-anak mendapatkan haknya dalam pengembangan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.



Ni Putu Santiasih, Kepala Sekolah TK Darma Bhakti, boleh berlegas hati. Kini sekolah yang ia pimpin menjadi satu-satunya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi rujukan seluruh sekolah sejenis di Parigi Moutong. Dharma Bakti menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, posyandu, Bina Keluarga Balita, dan Pasraman yakni belajar Kitab Weda bagi anak-anak beragama Hindu.

Putu Santiasih seorang petani dan ibu rumah tangga biasa. Hanya lulus SMP, sebelum belajar paket C (setara SMA) dan melanjutkan studi ke Universitas Terbuka. Ketika pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Parimo memprogramkan Satu Desa Satu PAUD, aparat Desa Kotaraya Timur mendirikan PAUD Dharma Bakti. Putu Santiasih didaulat sebagai pengelola.



Warga Desa Kota Raya Timur bahu membahu memperindah PAUD Dharma Bhakti (Dokumentasi WVI AP Parimo)

“Dulu ada yang tidak setuju. Tapi saya dan ibu-ibu PKK jalan saja. Kami mengajar hanya bermodal semangat. Tidak punya ilmu mendidik,” ujarnya. Murid PAUD Dharma Bakti adalah anak-anak warga Desa Kotaraya Timur. Jumlahnya tidak sampai 20 orang ketika itu.



Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat

Kantor operasional WVI di Parimo (AP Parimo) dibuka pada tahun 2011. Langkah awal adalah melakukan pemetaan institusi PAUD dan posyandu. Setahun kemudian, AP Parimo mulai memberikan pendampingan kepada PAUD di Kecamatan Mepanga dan Tomini di mana TK Darma Bhakti adalah salah satunya.

“Kami mendampingi 18 PAUD di 10 desa. Kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama kecakapan para guru dalam melakukan pengajaran yang ramah terhadap anak,” Setyo Lesmono, Area Program Manager WVI Parimo, menjelaskan.

Seiring waktu, kata Lesmono, Desa Kotaraya Timur mulai fokus membangun PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). PAUD HI diperlukan untuk pengembangan anak usia dini demi memenuhi kebutuhan esensial mereka dalam berbagai aspek fisik dan nonfisik dalam mengembangkan 5 potensi dasar yaitu otak kanan (afeksi), otak kiri (kognisi), panca indera, emosi, dan motorik.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, PAUD HI perlu bekerja sama dengan lembaga lain sebagai mitra. Pemerintah Desa Kotaraya Timur menggandeng puskesmas, UPD Dikbud, dan PLKB pada tingkat kecamatan. “Selama pendampingan berlangsung, para guru sangat antusias. Kemitraan dengan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat juga sangat menonjol. Semangat ini sangat pas dengan keinginan WVI untuk memunculkan sebuah model yang akan diserahkan kepada pemerintah untuk direplikasi ke desa atau kecamatan lainnya,” kata Lesmono.

WVI mengawali kegiatan bersama untuk kunjungan belajar tentang PAUD HI ke Poliwalimandar. Semua jejaring diajak: pemerintah desa, PKK, UPTD Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten, PLKB, dan kabag KB, para kader posyandu dan kepala sekolah TK. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya rancangan pembentukan



PAUD HI Darma Bhakti. Dalam rancangan tersebut tertuang juga kesepakatan koordinasi yang harus dilakukan secara rutin dan bersama-sama, termasuk dengan komite sekolah.

Kunjungan harian mulai digiatkan oleh WVI. Koordinasi lintas sektor difasilitasi oleh mereka. Tiga bulan sekali dilakukan pertemuan rutin bersama seluruh unsur di level kecamatan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, PAUD HI perlu bekerja sama dengan lembaga lain sebagai mitra. Pemerintah Desa Kotaraya Timur menggandeng puskesmas, UPD Dikbud, dan PLKB pada tingkat kecamatan.

Dalam pertemuan ini, semua unsur diajak untuk membuat presentasi tentang berbagai capaian yang telah dilakukan.

“Peran WVI hanya memainkan rasa saling berkompetisi untuk memunculkan hal baik yang telah terjadi. Hubungan secara personal juga merupakan salah satu poin penting terbangunnya kedekatan dan mengenal satu dengan lainnya,” kata Astriyana Telumbanua, Community Development Coordinator WVI.



Tabel Roadmap TK Darma Bhakti April-Agustus 2017



(Sumber:WVI Kantor Operasional Parimo)

Dari Ruang Bersekat

TK Darma Bhakti pada awalnya berupa sebuah ruangan yang disekat dua. Jumlah murid tak sampai 20 orang. Guru sering berganti sebab hanya bersifat sukarela. Tak jauh dari situ ada juga sekolah lain, yakni PAUD Widya Dharma. Kondisinya sama. WVI mengusulkan agar keduanya disatukan demi efektivitas pendampingan.

“Kami diskusi dengan pemerintah desa terutama soal kualitas pengajaran dan pelayanan sekolah. Akhirnya, mereka sendiri yang memutuskan untuk melebur kedua sekolah ini. Gedung permanen dibangun untuk menampung lebih banyak murid. Juga lebih layak untuk proses belajar-mengajar. WVI kebagian tugas pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengajaran,” kata Lesmono.



Astriyana mengatakan, pada awalnya guru-guru tidak mempunyai Rencana Pembelajaran Harian dan Mingguan (RPPH & RPPM). Belum ada kalender akademis. Pelayanan posyandu juga masih terpisah dengan PAUD. Belum ada kader Bina Keluarga Balita (BKB). Komite sekolah pun belum dibentuk.

Setelah pendampingan intensif, guru-guru mulai beralih mengajar dengan panduan RPPM & RPPH. Teknis pembelajaran dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan cara bermain dan belajar (sistem sentra). Tidak hanya menekankan kognitif siswa, tetapi juga karakter mereka. Karena itu, pendidikan “harmoni” diterapkan, yakni pembelajaran tentang nilai moral dan pembiasaan yang baik bagi anak antara lain: belajar antri, mengucapkan salam, bertoleransi, dan seterusnya. Gedung sekolah juga lebih representatif, terdiri atas ruang kelas kecil, kelas besar, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang BKB. Teras dan halaman sekolah ditata rapi.



Deklarasi PAUD HI oleh Camat dan UPTD Pendidikan kecamatan Mepanga (Dokumentasi WVI AP Parimo)



Komite sekolah dibentuk. Orang tua berperan aktif, baik untuk kerja bakti merawat halaman sekolah maupun menjadi guru bantu dengan sistem piket bergilir untuk mengantar anak ke toilet. Kegiatan posyandu terintegrasi dengan PAUD. Pada hari dilaksanakan posyandu, anak-anak datang berkunjung ke sana dan dihitung sebagai jam pelajaran sekolah.

Data penimbangan berat dan tinggi badan rutin dilakukan setiap bulan. Kader BKB aktif melakukan konseling. Semua kader dan guru PAUD sudah mempunyai SK dari kepala desa. Sudah ada insentif bagi para kader posyandu, kader BKB dan guru PAUD yang dialokasikan dari Dana Desa. Supervisi dari puskesmas dan petugas PLKB rutin dilaksanakan.



PAUD HI Darma Bhakti terkait dengan Posyandu yang mengukur keberhasilan gizi balita dengan memakai Balok SKDN untuk mendapatkan gambaran seberapa jauh keberhasilan program UPGK (Upaya Peninjauan Gizi Kurang) di tingkat posyandu atau desa (Dokumentasi WVI AP Parimo)

Pada September 2017, Kabupaten Parimo mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak. Semenjak itu, WVI bersama Pemerintah Desa Kotaraya Timur, UPTD DisdikBud Kecamatan Mepanga semakin



“gencar” berpromosi kepada pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD & DIKMAS untuk datang berkunjung ke TK Darma Bhakti.

Setelah melakukan beberapa kunjungan, kata Lesmono, TK Darma Bhakti ditetapkan sebagai sekolah rujukan untuk pengembangan lembaga pendidikan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong.

“Darma Bhakti merupakan salah satunya (lembaga) pendidikan usia dini yang berkontribusi terhadap terpenuhinya salah satu indikator pada KLA Kabupaten Parigi Moutong,” kata Lesmono sumringah.

Untuk memastikan keberlanjutan program, semua model yang telah dikembangkan bersama masyarakat akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dijaga keberlanjutannya.

Hasil kemitraan antara pemerintah desa, sektor pendidikan dan kesehatan serta dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, TK Darma Bhakti telah memenuhi standar minimum nasional dan memperoleh akreditasi “B” berdasarkan dokumen akreditasi nasional No. 023 / PAUD PNF.AKR / 2017.

Sejak Juli 2017 kata Lesmono, pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-6 tahun selalu dilaporkan kepada orang tua berdasarkan data dari posyandu dan TK. Pertemuan lintas sektoral terus dilakukan untuk memantau kualitas pendidikan. Pertemuan ini telah terjadwal.

“Yang sedang kami jalankan sekarang adalah pemantauan kepemilikan akta kelahiran semua anak,” ujarnya.

Per September 2017 tercatat 121 anak balita (64 anak laki-laki dan 57 perempuan) dan 64 anak berusia 3-6 tahun (terdiri atas 28 anak laki-laki dan 36 perempuan) mendapatkan keuntungan dari integrasi ini.



Putu Santiasih mengungkapkan kegembiraannya. “Kami senang WVI mendampingi desa kami. Banyak manfaat yang didapat oleh anak-anak dan khususnya bagi kami sebagai tutor PAUD. Selama 4 tahun desa kami didampingi WVI, sedikit demi sedikit ada perubahan pada anak-anak misalnya anak-anak di sekolah kami sudah bisa menerapkan buah dari Pendidikan Harmoni,” ujarnya.



Pertemuan komite orang tua PAUD Darma Bhakti (Dokumentasi WVI AP Parimo)

TK Dharma Bakti juga, lanjut dia, terpilih menjadi PAUD percontohan untuk tahun 2017. “Kami bangga dan terharu dan sempat meneteskan air mata. Semoga kami beserta para tutor dapat bekerja keras dengan dukungan pemerintah desa, orang tua, dan masyarakat Desa Kotaraya Timur,” pungkas Putu.

WVI, kata Lesmono, selalu berupaya maksimal agar setiap anak hidup utuh sepenuhnya sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara holistik. “Khusus di Parimo, kami terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak,” ujarnya.

Untuk memastikan keberlanjutan program, semua model yang telah dikembangkan bersama masyarakat akan diserahkan kepada pemerintah daerah.***



“Saya selalu ingatkan kawan untuk tidak pukul anak lain, dalam forum anak kami sering sampaikan ke orang dewasa supaya jangan pukul anak-anak.”

Merlin, 15 tahun,
Forum Anak Kabupaten Sikka, NTT
Perwakilan Asia Pasifik mengenai Penghapusan Kekerasan
Terhadap Anak di Kolombo, Srilanka

Praktik Cerdas dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

Mior Dadin

Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sikka



Anak-anak paling rentan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), termasuk anak-anak di Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Mereka bisa mengakses *gadget* dan menemukan banyak hal baru tanpa bimbingan. Orang tua, tokoh agama dan masyarakat menilai anak-anak mereka telah meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka bisa temukan dari lingkungan mereka seperti cerita-cerita lokal, kebiasaan lokal setempat, kegiatan ritual di masyarakat dan permainan tradisional yang membentuk karakter baik, beralih ke permainan *gadget* yang mengandung kekerasan, pornografi dan menebalkan rasa egois.



Masyarakat Doreng, khususnya di Desa Kloangpopot sangat resah dengan kondisi ini. Hasil diskusi dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan guru disimpulkan telah terjadi perubahan nilai yang menggerus kearifan lokal di dalam masyarakat.

Mereka membandingkan sikap anak-anak sebelum dan sesudah *gadget* masuk. Jauh sebelum *gadget* masuk, kata mereka, anak-anak Kloangpopot masih memegang sopan-santun. Memberi salam bila bersua di jalan atau menyapa jika lewat di depan rumah.

Sebaliknya sekarang anak-anak tampak cuek, tidak peduli dan asyik dengan dunia mereka sendiri. Jika dulu anak-anak Kloangpopot mengandalkan permainan tradisional yang mensyaratkan kebersamaan, sekarang mereka bermain *gadget* yang sangat individual.

“Dari kesaksian para orang tua, bahkan ada anak yang memalak pengguna jalan. Anak-anak juga tidak pernah lagi berpamitan atau memberi salam kepada orang tuanya ketika pergi atau pulang sekolah,” kata Johny Noya, AP Manager WVI Sikka. Secara umum masyarakat menilai telah terjadi kemerosotan pada hampir semua lembaga pendidikan di Sikka.

Keresahan di atas diperkuat hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar (DED) pada bulan Mei 2012. Lembaga kajian pendidikan dasar yang berkantor di Yogyakarta ini menemukan tiga komponen yang melatarbelakangi merosotnya pendidikan di Sikka.

Pertama, secara umum kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di sekolah semakin rendah. Mereka lebih mementingkan adat dan terjebak ke dalam ritual pesta yang mengedepankan gengsi, bukan pada esensi pesta adat. Pendapatan mereka terkuras hanya untuk bisa tampil atau memenuhi tuntutan ritual tersebut. Para orang tua mengabaikan pendidikan anak-anak mereka.



Kedua, banyak sekali guru yang tidak paham tentang budaya di Sikka sehingga sulit mentransfer pengetahuan budaya kepada anak, terutama nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Apalagi ada kecenderungan para guru tinggal jauh dari sekolah, sehingga hubungan dengan anak dan masyarakat semakin renggang. Mengajar hanya sebatas tugas dan tanggung jawab fungsional saja.

Ketiga, dari sisi anak sendiri yakni merosotnya prestasi belajar siswa. Gambaran paling nyata diperoleh dari data kelulusan siswa di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2009 tingkat kelulusan SLTA masih mencapai 44,87 persen dari total 1.569 siswa. Pada tahun 2010 dari 1.780 siswa se-kabupaten Sikka yang mengikuti Ujian Nasional, hanya 324 siswa yang dinyatakan lulus. Sisanya, sejumlah 1.456 orang tidak lulus.

Selain kondisi riil terkait tiga faktor di atas, tulis laporan DED itu, potensi konflik baik horisontal, vertikal, maupun gabungan keduanya bisa muncul dari dalam tubuh masyarakat Sikka sendiri oleh berbagai kesenjangan dan warisan sejarah terbentuknya masyarakat di sana.

Memang ada mekanisme penyelesaian konflik yang telah berakar dalam budaya masyarakat Sikka melalui *kulababong* (musyawarah). Hanya saja formalisme birokrasi yang semakin menjadi arus utama dalam menata kehidupan bersama membuat model-model penyelesaian secara adat semakin mundur.

Salah satu cara untuk menghidupkan kembali spirit *kulababong* ini, kata Johnny, adalah melalui pendidikan di sekolah. Nilai-nilai yang sudah tumbuh subur dalam rahim kultur masyarakat Sikka perlu dihidupkan dan dikembangkan lagi dan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Karena itu kolaborasi antara Dinas PPO Kabupaten Sikka, Komisi Pendidikan (Komdik) Keuskupan Maumere, Sanpukat, konsultan pendidikan TRUE dari Bogor, WVI dan DED, bahkan dengan pemerintah daerah Provinsi NTT sangat diperlukan. Tujuannya, untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan karakter yang kontekstual di Kabupaten Sikka.



Strategi yang disepakati adalah melakukan pendampingan guru dan siswa terhadap enam sekolah dengan mengedepankan konsep mendidik di dalam masyarakat Sikka yang disebut Pendidikan Karakter Kontekstual dengan Spirit *Kulababong*.

Khusus di wilayah Kloangpopot dan Waladu, para *stakeholders* dalam diskusi yang dibangun juga memasukkan unsur *Mior Dadin* dalam pendekatan Pendidikan Karakter Kontekstual dengan Spirit *Kulababong* tersebut. *Mior Dadin* ini ditentukan karena kekhasan dari wilayah Desa Kloangpopot yang lokasinya lebih jauh dibandingkan dengan wilayah/desa lainnya yang juga menerapkan pendidikan karakter kontekstual dengan spirit *kulababong* seperti di SDK Wairpelit, SDK Nataweru, SDK Napungliti, dan SDK Du yang wilayahnya cukup dekat ke Sikka. Diharapkan selama pendampingan terjadi, apabila dianggap berhasil maka mitra lainnya seperti Dinas PPO dan komdik keuskupan akan mereplikasi ke sekolah lainnya.

“Wilayah pelayanan kami ada pada tiga kecamatan. Salah satunya adalah di Kecamatan Doreng. Dua sekolah yakni SDK Kloangpopot dan SDI Wualadu kami ambil sebagai percontohan konsep *Mior Dadin*. Sedangkan sekolah yang ada dalam satu gugus menjadi imbas dari pendampingan yang dilakukan WVI,” jelas Johny.

Filosofi *Mior Dadin*

Mengapa konsep pendidikan kontekstual *Mior Dadin* yang dipilih? Karena konsep ini melibatkan keluarga, masyarakat dan sekolah dalam membangun karakter baik anak-anak.

Mior Dadin berasal dari kata “*mior*” yang berarti baik, hebat atau unggul, dan “*dadin*” yang mengandung makna berkesinambungan, kontinu atau selamanya. Pendidikan kontekstual *Mior Dadin* berarti pendidikan yang terjadi terus-menerus, dimulai dari keluarga, dengan melibatkan



berbagai pihak, yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan alam lingkungan setempat yang mampu membentuk manusia berkarakter baik, cinta lingkungan, hemat dan mandiri.

Model pendidikan *Mior Dadin* mempunyai tiga pilar yakni: *Modung Mior* (karakter yang baik), *Da'an Dadin* (lingkungan hidup) dan *Na'i Nalun* (menata ekonomi masa depan).

Modung Mior artinya, anak-anak dibiasakan untuk senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S) baik kepada orang tua di rumah maupun guru di sekolah.

Sementara *Da'an Dadin* berarti para guru didampingi untuk mampu mengambil konteks lokal dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran di sekolah, seperti dari makanan tradisional, tarian tradisional, permainan tradisional dan mata pencaharian tradisional.



Menari, salah satu kegiatan pendidikan kontekstual *Mior Dadin* di salah satu sekolah di Sikka, NTT (Dokumentasi APWVI Sikka)



“Misalnya setiap pesta adat di Sikka pasti ada kue yang dibikin. Kue-kue tersebut dibuat sesuai dengan bangun ruang kubus atau segitiga atau segi empat seperti dalam pelajaran matematika. Inilah yang diajarkan kepada para murid. Mereka belajar matematika dari peristiwa keseharian mereka,” jelas Johny. Para guru tidak lagi sekadar mentransfer ilmu seperti yang telah lazim dilakukan, tetapi mengajak murid berkegiatan dan menemukan persoalan

dari pelajaran yang diajarkan. Para murid juga diajak melakukan penghijauan di lingkungan sekolah dengan menanam kebun sekolah beragam tanaman bunga dan obat-obatan.

Konsep *Na'i Nalun* dijalankan dengan membiasakan anak-anak menabung. Sekolah menjalin kerja sama dengan Koperasi *Credit Union* (CU) di Maumere dan memilih salah satu guru menjadi koordinator menabung. Tugasnya adalah mendaftarkan nama anak dan jumlah tabungan mereka setiap minggu.

Pendidikan kontekstual
Mior Dadin berarti pendidikan yang terjadi terus-menerus, dimulai dari keluarga, dengan melibatkan berbagai pihak, yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan alam lingkungan setempat yang mampu membentuk manusia berkarakter baik, cinta lingkungan, hemat dan mandiri.



Seorang siswi SD sedang menjelaskan kepada teman-temannya tentang Pojok Belajar di kelas mereka (Dokumentasi AP WVI Sikka)

Selain menabung uang di koperasi, anak-anak dikenalkan juga dengan “menabung” tanaman untuk masa depan. Mereka menanam tanaman komoditi yang ada di Kloangpopot seperti kelapa, kemiri, cocoa dan cengkeh. Selain menabung, tanaman-tanaman ini bisa menjadi media untuk belajar.

Mengalahkan Hambatan

Pasti selalu ada hambatan. Demikian pula yang dialami WVI ketika pertama kali menginisiasi program ini. “Ada orang tua yang kurang memahami cara pendampingan yang kami lakukan. Mereka protes anak-anaknya tidak mendapat pelajaran karena guru-gurunya dilatih terus.



Ketika guru mengajak anak-anak beraktivitas di luar kelas, para orang tua mengira tidak ada pelajaran karena biasanya guru mengajar di depan kelas,” kata Johny. Pernah pula terjadi fasilitator WVI yang bertugas di lapangan diserang para orang tua.

Tetapi peristiwa itu justru menjadi berkat terselubung. Dengan demikian WVI punya kesempatan menjelaskan kepada orang tua. Bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat serta gereja, mereka melakukan pendekatan dan memberi pemahaman kepada orang tua. “Lama-lama para orang tua justru sangat mendukung metode yang kami lakukan,” kata Johny sembari tertawa.



Hasil keterampilan siswa. Bahan-bahan diambil dari lingkungan sekitar sekolah (Dokumentasi AP WVI Sikka)

Hambatan lain adalah guru-guru yang malas mengikuti pendampingan entah karena usia maupun karena alasan lain. Tetapi kendala ini bisa diatasi dengan kesepakatan bersama dengan pihak sekolah, orang tua



dan pemerintah desa. Setiap tiga bulan diadakan pameran di sekolah. Salah satu yang dipamerkan adalah pencapaian penerapan konsep *Mior Dadin*. Dalam pameran ini orang tua ikut serta sebagai narasumber.

Mendapat Dukungan

Sejak inisiasi untuk pengembangan pendidikan karakter di atas, pemerintah dalam hal ini Dinas PPO, Yayasan Sanpukat, gereja dan orang tua selalu terlibat sejak *assessment* (KII, GGD dan PLA). Bahkan istilah *Mior Dadin* dipakai sebagai hasil kesepakatan bersama semua pihak. Demikian pula saat implementasi program, pemerintah melakukan *monitoring* ke sekolah-sekolah bersama pihak yayasan dalam hal ini gereja. *Monitoring* dilakukan tiga bulan sekali.

Pemerintah desa pun terlibat dalam *monitoring*. Mereka juga mengintegrasikan tiga konsep *Mior Dadin* ke lembaga pemerintahan desa. Pembiasaan tiga nilai tersebut tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan pemerintah desa dan keluarga.

“Untuk keluarga, WVI bekerja sama dengan Komisi Keluarga Keuskupan Maumere untuk membantu melatih orang tua tentang pola asuh anak dengan konsep *Mior Dadin* secara iman Katolik,” kata Johny.

Hasil percontohan konsep *Mior Dadin* dianggap berhasil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Karena itu, pada tahun 2014 Bupati Sikka mengeluarkan Surat Keputusan tentang replikasi pendidikan kontekstual *Mior Dadin* ke semua sekolah yang ada di Sikka, khususnya untuk tingkat SD. “Ada 350 Sekolah Dasar di seluruh Kabupaten Sikka yang telah melakukan replikasi pendidikan karakter *Mior Dadin* ini,” jelas Johny.



Memetik Hasil

Setelah *Mior Dadin* menjadi bahan ajar di sekolah, segera terasa perubahan sikap dari anak-anak. Yang paling praktis kata Johny adalah, 5S kini menjadi kebiasaan hidup anak-anak baik di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat.

“Anak-anak sekarang sudah beri salam dan sapa, saat saya ketemu di jalan,” kata Kepala Desa Kloangpopot seperti ditirukan Johny.

Kesaksian beberapa orang tua, kata Johny, anak-anak mereka saat pergi dan pulang sekolah sudah berpamitan dan memberi salam. “Sekarang sudah ada kebun sekolah serta tabungan anak di sekolah. Ada juga pojok baca, perpustakaan di SD Kloangpopot.

Para orang tua terlibat langsung dengan sekolah terutama untuk mengawasi pelaksanaan konsep *Mior Dadin*. Di Kloangpopot mereka menuliskan nilai-nilai *Mior Dadin* di tembok sekolah,” kata Johny.

Keberhasilan ini juga diapresiasi DPRD Kabupaten Sikka. Mereka kini menyiapkan anggaran untuk Dinas PPO guna mereplikasi praktik cerdas tersebut di semua sekolah di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan SK Kepala Dinas PPO No.79/SK/PPO/2015 ada 30 *master teacher* yang menjadi fasilitator untuk melakukan tahapan replikasi ke-30 sekolah yang terdiri dari 20 sekolah di wilayah dampingan WVI dan 10 sekolah di luar. Kegiatan ini didukung oleh Dinas PPO dengan menggunakan anggaran dari Dinas PKO sebesar Rp300 juta.

“Anggaran ini dipakai untuk memperlancar kegiatan replikasi. Dampak yang dirasakan adalah beberapa guru sudah bisa menyusun silabus dan RPP kontekstual dengan kreatif yang menggunakan sumber dari alam sekitar. Bahkan tahun 2016, pada waktu dilakukan pertemuan Dinas PKO se-NTT di Kabupaten Sikka, mereka mengunjungi satu sekolah model pendidikan karakter kontekstual dengan spirit *kulababong*.

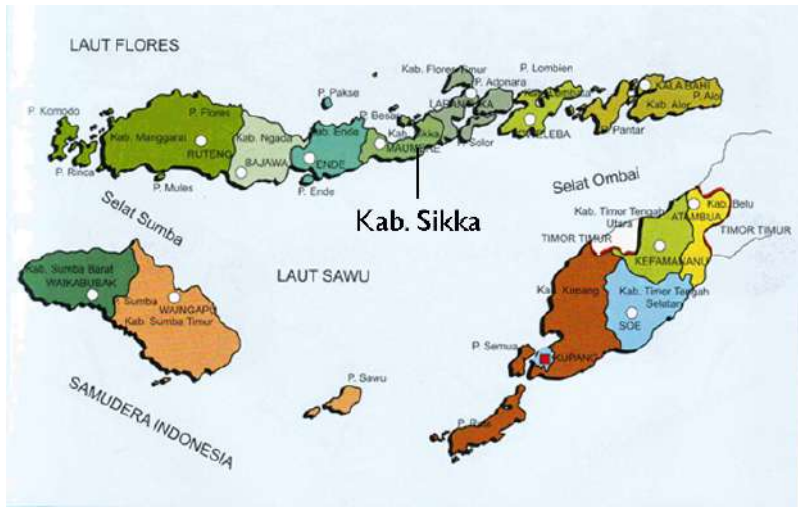


“Yosef salah satu guru kreatif yang mendesain sendiri pembelajaran di kelasnya. Misalnya, ia menggunakan nada lagu *Bangun Pemuda Pemuda* tetapi kata-katanya dia ubah menggunakan rumus matematika.

“Saya sangat senang dengan kegiatan ini karena selama ini saya sendiri saja melakukan (model *Mior Dadin*) di kelas. Tapi sekarang dengan ada kegiatan replikasi berarti ke depannya pasti teman-teman guru yang lain juga ikut terlibat dan akan menjalankannya secara bersama-sama,” kata Yosef Avion, Guru dari SDI Bangboler.

Yosef salah satu guru kreatif yang mendesain sendiri pembelajaran di kelasnya. Misalnya, ia menggunakan nada lagu *Bangun Pemuda Pemuda* tetapi kata-katanya dia ubah menggunakan rumus matematika.

“Sangat membantu anak-anak. Saat ujian, anak-anak tinggal menyanyi dan otomatis mereka ingat rumus itu,” ujarnya sembari tertawa. ***



"Sudah semestinya suara anak didengarkan karena mereka memiliki hak sebagai ciptaan Tuhan. Apa yang mereka sampaikan muncul dari kepolosannya. Mereka menilai kondisi di sekitar mereka secara jujur tanpa tendensi tertentu."

Romanus Rabu
Kepala Desa Wolomotong,
Kabupaten Sikka, NTT

Praktik Cerdas dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

Perdes yang Pro Anak dan Perempuan



Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur kini memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembangunan Desa Berbasis Hak Anak. Perdes yang sama juga mengatur tanggung jawab terhadap perempuan terutama para ibu hamil.



Pada bulan November 2012, Pelatihan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Perspektif Anak diselenggarakan secara bersama-sama oleh Bappeda Kabupaten Sikka, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para camat, utusan pemerintah desa, NGO mitra dan para staf Wahana Visi Indonesia (WVI) Sikka dan Zonal NTT. Pelatihan dilakukan atas kesadaran belum dilibatkannya anak-anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Saat itu, semua kebutuhan anak-anak dibahas oleh orang dewasa. Para orang tua menilai anak tidak tahu apa-apa sehingga tidak perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Orang dewasa belum punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk turut berpartisipasi menyangkut diri anak sendiri. Masih ada pandangan, segala sesuatu yang cocok bagi orang tua berarti cocok pula untuk anak.

Bukan hanya pada tingkat desa. Pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi seperti kecamatan dan kabupaten, pandangan ini masih umum. Keterlibatan anak belum dianggap penting dan mendesak. Apalagi memenuhi hak-hak dasar mereka. Padahal negara dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak-hak dasar anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.

Pelatihan dilanjutkan dengan uji coba Musrenbangdes dengan perspektif anak di Desa Mahebora, Kecamatan Nita, Sikka. Dalam uji coba tersebut, anak-anak antusias memberikan usulan tentang kebutuhan mereka. Saat itu barulah pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa anak-anak mampu memberikan usulan sesuai kebutuhan yang mereka rasakan.

“Kami melakukan pendekatan baik secara formal maupun non formal dengan sering melakukan diskusi dan *sharing* bersama. Kami juga sering mengajak mereka untuk ikut serta atau melihat langsung ke lapangan. Apalagi setelah mereka melihat perubahan pada anak-anaknya. Akhirnya pemerintah dan masyarakat bisa paham. Merekalah yang



kemudian menjadi pendukung utama program kami,” kata Johny Noya, AP Manager WVI Sikka.

Berbekal pelatihan dan uji coba ini, keterlibatan anak dalam Musrenbangdes di Desa Ladogahar dilakukan secara resmi. Kegiatan ini merupakan Musrenbangdes pertama di NTT yang melibatkan anak. Media lokal meliputnya karena dinilai unik dan tidak biasa. Kesuksesan Desa Ladogahar yang melibatkan anak dalam Musrenbangdes mengantarkan Kepala Desa Ladogahar ke Jakarta memenuhi undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk beraudiensi dengan Menteri Yohana Yembise.

Pemerintah Kabupaten Sikka dan warga desa lain sepakat untuk terus melibatkan anak dalam Musrenbangdes dengan menggunakan panduan Musrenbang Anak yang disusun bersama-sama oleh WVI Zonal NTT dan Bappeda NTT. Saat ini hampir semua desa di Kabupaten Sikka telah melibatkan anak dalam Musrenbangdes.

Musrenbangdes Ladogahar menjadi momentum untuk bangkit. Pemerintah Kabupaten Sikka dan warga desa lain sepakat untuk terus melibatkan anak dalam Musrenbangdes dengan menggunakan panduan Musrenbang Anak yang disusun bersama-sama oleh WVI Zonal NTT dan Bappeda NTT. Saat ini hampir semua desa di Kabupaten Sikka telah melibatkan anak dalam Musrenbangdes.



Kisah Desa Wolomotong

Salah satu desa yang secara konsisten melibatkan anak dalam Musrenbangdes adalah Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng. Mereka melibatkan anak sejak 2014 hingga 2017. Anak-anak yang tergabung dalam FORADES (Forum Anak Desa) diberi ruang untuk berpartisipasi. Anak-anak berhasil mendorong Pemerintah Desa Wolomotong memasukkan perencanaan kerja mereka dalam APBDes.

Cerita tentang Wolomotong, kata Johny, adalah cerita tentang upaya keras Romanus Rabu, sang kepala desa mengubah persepsi warganya untuk mendengarkan suara anak dalam mengambil kebijakan. “Susah sekali karena dalam budaya patriakal, suara anak dan perempuan memang tidak dianggap,” kata Johny.



Pelibatan anak dalam Musrenbangdes telah menjadi kebiasaan di Desa Wolomotong, Kabupaten Sikka (Dokumentasi WVI AP Sikka)

Namun Romanus tidak patah arang. Ia mempengaruhi satu-dua tokoh agama dan tokoh masyarakat. Para tokoh ini yang ikut



mempengaruhi yang lain. “Pak Romanus biasanya mengatakan seperti ini; Sudah semestinya suara anak didengarkan karena mereka memiliki hak sebagai ciptaan Tuhan. Apa yang mereka sampaikan muncul dari kepolosannya. Mereka menilai kondisi di sekitar mereka secara jujur tanpa tendensi tertentu,” Johny menirukannya.

Fransiska Merlina Sareng, salah satu anak yang terlibat di Forum Anak saat usianya 15 tahun. “Kami hanyalah anak dari desa, tapi kami bisa melakukan hal lebih untuk aktif berpartisipasi di Forum Anak Desa,” kata Merlin. Ia kerap berkampanye di Maumere tentang Penghentian Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Karena aktivitasnya ini, Merlin ikut serta dalam acara peluncuran kampanye PKTA World Vision Asia Pasifik di Kolombo, Sri Lanka.

Seiring waktu warga Desa Wolomotong sadar. Mereka akhirnya sepakat membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Anak dan Perempuan. Ini yang pertama di Kabupaten Sikka.

Perdes dibuat pada tahun 2014. Dimulai dengan menggali isu kesehatan, perlindungan anak dan pendidikan. Biro hukum Kabupaten Sikka, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan BPD terlibat penuh di dalamnya. Yang dibincangkan adalah tentang tata cara pembuatan produk hukum desa.

Akhirnya lahir Perdes Nomer 3 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa Berbasis Hak Anak. Perdes ini kata Johny dibuat berdasarkan penggolongan umur anak yakni 0-5 tahun, 6-11 dan 12-18 tahun dengan berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan dan partisipasi anak.

Pada pasal 9 Perdes ini misalnya, diputuskan bahwa setiap anak semenjak dalam kandungan berhak untuk hidup, dilahirkan selamat, memiliki identitas, bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat yang dimiliki.



Agar dapat memenuhi hak anak untuk lahir hidup, bertumbuh dan berkembang secara baik, maka setiap ibu beserta suami, orang tua dan keluarga, masyarakat, penyedia layanan kesehatan dan pemerintah berkewajiban menjalankan perannya masing-masing dan saling mendukung, terhadap semua upaya perlindungan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara.

“Sudah semestinya suara anak didengarkan karena mereka memiliki hak sebagai ciptaan Tuhan. Apa yang mereka sampaikan muncul dari kepolosannya. Mereka menilai kondisi di sekitar mereka secara jujur tanpa tendensi tertentu.”

Agar dapat memenuhi hak anak akan identitasnya, tulis pasal tersebut, maka setiap orang tua atau pengasuh wajib memberi identitas yang jelas kepada anak sesuai ketentuan agama yang dianut serta wajib dicatat dalam dokumen pencatatan sipil yang berlaku.

“Ini sangat memenuhi indikator KLA terutama untuk klaster hak sipil dan kebebasan,” jelas Johny.

Pada pasal 6 diatur tentang Pelibatan Anak dalam Proses Perencanaan Desa. Anak kategori usia 10-18 tahun atau sekurang-kurangnya berada di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan selebihnya berusia 12 tahun ke atas, dapat mengikuti kegiatan Musrenbangdes mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat kabupaten. Anak-anak yang terlibat dalam proses Musrenbangdes wajib didampingi oleh orang dewasa dengan tetap mengedepankan kebebasan anak dalam batasan etika yang dipertanggungjawabkan. Suara anak dalam proses Musrenbangdes



wajib dihargai dengan menyepakati sekurang-kurangnya satu program prioritas yang dilakukan di tingkat desa dan satu program prioritas yang diteruskan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Perdes ini juga sudah mengatur soal penanganan terhadap anak korban kekerasan psikis sesuai dengan indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus. Dicantumkan bahwa setiap anak yang mengalami kekerasan psikis berupa *klaha ja'ang*, *jaji paong supa lepa*, *po'o kle*, *solo hulis heing hala*, *iking edeng*, *ane klageng* (bentakan, sumpah serapah, makian, pengkambinghitaman, intimidasi dan *bulying*) wajib melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tua atau guru, atau pendamping anak atau pemerintah desa untuk penanganan lebih lanjut.



Sosialisasi Perdes Perlindungan Anak dan Perempuan di Desa Wolomotong (Dokumentasi WVI AP Sikka)



Aturan Bagi Perempuan Hamil

Perdes Desa Wolomotong juga mengatur tentang dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Karena itu, setiap suami ibu hamil atau penanggung jawab lainnya wajib membebastugaskan para ibu hamil dari pekerjaan-pekerjaan berisiko aborsi sekurang-kurangnya dari kunjungan pertama (K1) sampai kunjungan ketiga (K3).

“Para suami juga diwajibkan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental ibu hamil dengan memberi asupan bergizi dan menghindari praktik-praktik kekerasan fisik maupun psikis, menghindari rokok, minuman beralkohol, narkoba dan zat-zat lain yang membahayakan kesehatan ibu dan janin,” jelas Johnny.

Selain itu Perdes juga mengatur tentang pemeriksaan ibu hamil dan persalinan pada sarana kesehatan, menyiapkan biaya dan kebutuhan materil lainnya selambat-lambatnya pada kunjungan pertama 0-12 minggu, memastikan kendaraan pertolongan persalinan dan tempat penampungan sementara bagi ibu hamil selambat-lambatnya 10 hari sebelum hari kelahiran, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

Fokus program di Wolomotong dan beberapa desa imbas bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi terutama pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas anak-anak, dan alokasi dana untuk kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak-anak.



keselamatan persalinan sesuai kearifan budaya sebelum hari kelahiran dan bahkan melakukan antisipasi dengan menyediakan calon donor darah sesuai petunjuk medis selambat-lambatnya 14 hari sebelum kelahiran.

Sampai saat ini kata Johny, fokus program di Wolomotong dan beberapa desa imbas bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi terutama pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas anak-anak, dan alokasi dana untuk kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak-anak.

Sekarang suara anak juga sudah mulai diperhatikan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa selalu melibatkan forum anak.

“Anak-anak sekarang semakin berani menyampaikan pendapat mereka terutama yang terkait hak-haknya,” kata Johny.

Dari semua itu, yang paling menggembirakan adalah kesadaran pemerintah desa untuk memberi anggaran dari dana desa bagi kegiatan Forum Anak. “Ini pengakuan luar biasa bagi peran anak-anak. Kita berharap akan terus berlanjut semua program ini,” harap Johny. ***



“Pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.”

Mama Yo
Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia
*Disampaikan dalam siaran pers Komitmen Penuh
Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak
tahun 2015*

Praktik Cerdas dari Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat

Foranchikha

Pejuang Cilik Dari Zamrud Katulistiwa



Salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) pada klaster sipil dan kebebasan adalah partisipasi anak melalui Forum Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dan Wahana Visi Indonesia (WVI) membentuk dan mengembangkan Forum Anak di Kota Pontianak yang diberi nama Forum Anak Cinta Khatulistiwa (Foranchika).



Pada tahun 2006 jumlah anak dampingan WVI Kantor Operasional Urban Pontianak yang berusia remaja (SMP-SMA) mencapai ratusan orang. Mereka tersebar pada 9 dari 29 kelurahan di Kota Pontianak. Para remaja ini perlu dibuatkan kegiatan yang positif agar mereka tidak terjebak ke dalam pergaulan negatif. Staf pendamping wilayah mulai mendata anak-anak yang potensial untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bersama.

“Setelah saling mengenal dan semakin kompak, anak-anak berinisiatif membuat sebuah wadah dengan nama Forum Anak Cinta Khatulistiwa (Forancikha) pada Mei 2007. Waktu itu Forum Anak Daerah belum familiar, bahkan belum ada di Kota Pontianak,” kata Margaretta Siregar.



Celoteh Anak, salah satu kegiatan Forum Anak Khatulistiwa (Dokumentasi WVI AP Singkawang)

Forum menjadi wadah berkumpul menyatukan ide dan aspirasi. Setiap tahun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri melalui latihan kepemimpinan, berorganisasi, partisipasi anak dan seminar tentang kesehatan reproduksi. Materi yang terakhir ini paling sering diberikan kepada anggota karena setiap tahun selalu ditemukan kasus pernikahan usia anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas.



Dari Forancikha muncul anak-anak muda yang berjiwa pemimpin yang membawa nilai-nilai keberpihakan pada pemenuhan hak anak.

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan membuat kemampuan anak-anak Forancikha meningkat. Mereka lebih percaya diri dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Kreativitas mereka meningkat dengan kemampuan menganalisa persoalan anak dan masyarakat yang baik. Dari

Forancikha muncul anak-anak muda yang berjiwa pemimpin yang membawa nilai-nilai keberpihakan pada pemenuhan hak anak. Selain itu, “ruang” bagi anak untuk berkontribusi terhadap proses pembangunan kota menjadi semakin terbuka.

“Pengetahuan mereka semakin berkembang terutama tentang hak-hak anak. Mereka juga sangat percaya diri dan mulai mengenal banyak orang dan sudah bisa berjejaring,” kata Margaretha.

Irwa Juana Riansyah menjabat sebagai Presiden ke-2 Forancikha mengatakan, salah satu alasan dia berkuliah di jurusan sosial adalah karena ketertarikannya pada kegiatan yang dilakukan selama di Forancikha. Melalui Forancikha, Irwa bisa berkunjung ke Nias sebagai fasilitator. Dia juga mewakili suara anak dalam pertemuan SDGs di Bali.

“Sebelum kenal Forum Anak saya lebih senang bermain saja. Saya juga dulu sangat pemalu dan gemetar kalau bicara di depan orang banyak. Manfaat Forancikha bagi saya sangat besar,” kata Irwa.

Kini Irwa telah terbiasa mengungkapkan pandangannya di forum. Ia juga melatih teman-temannya untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain.



Tedy Candra Presiden Forancikha ketiga (periode 2013-2015) bahkan terpilih menjadi Presiden Forum Anak Daerah untuk Kota Pontianak selama dua periode yakni tahun 2015-2016 dan 2016-2017. Tedy bahkan mewakili Indonesia dalam pertemuan di Afrika Selatan pada tahun 2014. Hingga sekarang Tedy masih aktif menjadi fasilitator anak. Ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Kota Pontianak dan berkuliah di Universitas Tanjungpura berkat keterlibatannya di dalam Forum Anak.

Orang tua dan pemerintah melalui dinas terkait sangat mendukung keberadaan forum ini. Apalagi pada 2011 Kota Pontianak menjadi salah satu percontohan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).



Anak-anak berdiskusi tentang pengenalan bagian-bagian tubuh mereka (Dokumentasi WVI AP Singkawang)

“Sebelum ada Forancikha pemerintah Kota Pontianak jarang melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tetapi sekarang pemerintah semakin sering memperhatikan masukan-masukan tentang



pengembangan anak. Kota Pontianak semakin peduli pada isu-isu yang melibatkan anak. Beberapa kebijakan pemerintah juga sudah pro anak misalnya dengan adanya zona aman ke sekolah serta taman bermain gratis yang mudah dijumpai di Pontianak saat ini,” kata Margaretha.

Forancikha banyak memberi kontribusi bagi pemenuhan kesejahteraan anak di Kota Pontianak. Misalnya memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak, cuci tangan pakai sabun, sosialisasi tentang tertib berlalu lintas, pentingnya menabung, sosialisasi tentang jajanan yang sehat, dan melakukan perayaan-perayaan besar seperti perayaan Hari Anak Nasional, Hari Bumi, hari HIV/AIDS serta advokasi Kecamatan Layak Anak.



Membantu anak-anak belajar mencuci tangan sendiri dengan bersih, bagian dari program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) (Dokumentasi WVI AP Singkawang)



Forancikha bekerja sama dengan Poltabes Pontianak untuk memfasilitasi Sosialisasi Tertib ber-Lalu lintas kepada sekitar 3.000 anak/ siswa yang ada di Kota Pontianak. Selain itu mereka juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan sosialisasi Cuci Tangan Pakai Sabun bagi sekitar 2.000 anak. Sementara dengan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan Anak & Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, Forancikha memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya gizi dan bahaya narkoba kepada anak-anak di Kota Pontianak.

“Forancikha juga turut serta dalam pertemuan gugus tugas untuk merumuskan Rencana Aksi Kota Pontianak Menuju Kota Layak Anak pada bulan November 2011 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang diikuti adalah pertemuan gugus tugas KLA terkait rencana aksi daerah. Forancikha menyampaikan masukan tersedianya bus sekolah,” kata Nurring Trisnowati, kini menjadi koordinator penelitian untuk Project EU CSO WVI dan berkantor di Sekadau.



Sosialisasi tentang Hak Anak di Tanjung Damai (Dokumentasi WVI AP Singkawang)



Dampak dari rencana aksi tersebut adalah terbentuknya forum-forum anak di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Pontianak seperti FA Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Sungai Beliang.

Selain itu Forancikha juga mendampingi pembentukan Forum Anak di Desa Toho di Kabupaten Mempawah, Desa Mandor di Kabupaten Landak, Desa Sajingan di Kabupaten Sambas dan Desa Ambawang di Kabupaten Kubu Raya. Karena karya mereka tersebut, sejak tahun 2012 Forancikha dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat Kota Pontianak.

Pada tahun 2013 Forancikha terlibat dalam program “Penelitian oleh Anak” atau Child Led Review terhadap indikator “Kota Layak Anak” dari perspektif anak untuk Kota Pontianak. Secara khusus

Mereka meneliti transportasi yang aman ke sekolah dan penghijauan kota. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap program “Pontianak Clean & Green Equator City”.

mereka meneliti transportasi yang aman ke sekolah dan penghijauan kota. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap program “Pontianak Clean & Green Equator City”, kerja sama antara pemerintah Kota Pontianak dengan pemerintah Swedia. Kerja sama ini secara khusus tentang perencanaan pembangunan taman dan ruang bermain yang ramah anak di beberapa wilayah di kota Pontianak.

Pada 2015 Forancikha dilibatkan dalam Musrenbang Kota Pontianak. Forancikha mengkritisi tingginya kecelakaan motor yang dialami anak di Pontianak. Salah satu penyebabnya adalah banyak anak mengendarai



motor meskipun belum cukup umur dan tidak punya SIM. Karena itu Forancikha mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan bus sekolah sehingga anak-anak tidak perlu membawa motor sendiri.

Pada tahun yang sama Forancikha melakukan penelitian di Kelurahan Siantan Hulu tentang kebersihan lingkungan. Hasil penelitian tersebut dibukukan oleh WVI dan disampaikan kepada pemerintah.

Karena prestasi-prestasi di atas, wakil Forancikha menjadi salah satu narasumber dalam kapasitasnya sebagai wakil anak muda Indonesia terhadap isi agenda pembangunan setelah tahun 2015 (*Post-2015 Development Agenda*) pada Februari 2013 yang difasilitasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan(UKP-PPP).



Evaluasi program kerja Forancikha (Dokumentasi WVI AP Singkawang)

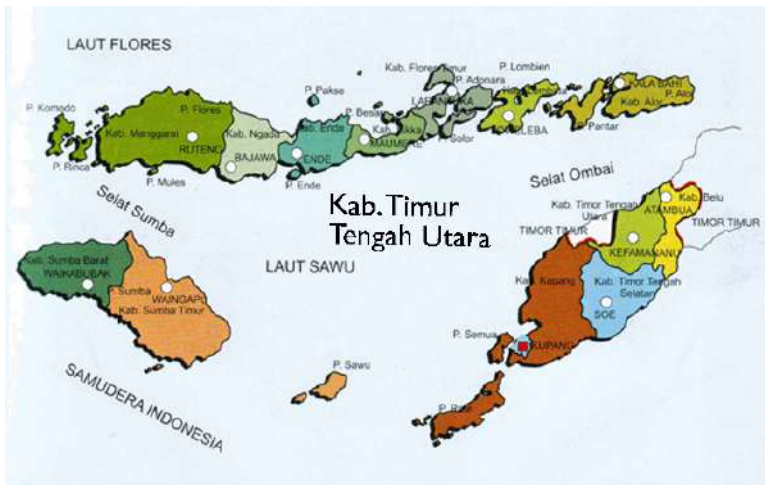
Wakil Forancikha juga menjadi salah satu narasumber dalam keterlibatan anak pada perencanaan pembangunan daerah (RAD, Musrenbang, dll) dalam kegiatan *High Level Panel Eminent Person for Post*



2015 Development Agenda pada bulan Maret 2013 yang difasilitasi oleh Dewan Kerja Kepresidenan Republik Indonesia.

Selain itu, salah satu wakil Forancikha menjadi narasumber mewakili Asia-Pasifik dalam mengusulkan prioritas pelayanan dari perspektif anak pada kegiatan Trilineal Council BOARD World Vision Internasional di Tanzania, Afrika pada bulan November 2013.

“Sejak adanya Forancikha, pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2016 mengalokasikan dana untuk pembentukan Forum Anak Kelurahan di 29 kelurahan di seluruh Kota Pontianak. Termasuk sembilan kelurahan yang menjadi dampingan WVI, kembali didaftarkan ke pemerintah Kota Pontianak,” jelas Nurring. ***



**“Sisihkan waktu untuk berbagi dengan sesama,
terutama anak-anak.”**

Ria Fajar Pramono
Karyawan swasta
Relawan yang mengikuti kegiatan Wahana Visi Indonesia di
Kupang, NTT

*Praktik Cerdas dari Kabupaten Timor Tengah Utara,
Nusa Tenggara Timur*

Skol Amnasit

Ketika Orang Tua “Bersekolah”
Demi Anak-Anak Mereka



(Dokumentasi WWI/AP/TTU)

Skol Amnasit adalah praktik pendidikan kontekstual yang menjadi bagian dari kearifan lokal orang Dawan di Pulau Timor. Skol Amnasit bicara tentang pola asuh yang mempengaruhi anak. Pemerintah desa sangat mendukung dan membuat kebijakan tentang Skol Amnasit.



Keras, kasar dan mudah “main tangan” telah menjadi stigma bagi orang Timor. Orang tua yang sering menampar, mencubit dan meneriaki anak atas nama disiplin merupakan pemandangan biasa di sana. Demikian pula guru-guru di sekolah. Padahal hampir semua suku maupun subsuku di Timor, suku Dawan misalnya, punya kearifan lokal terkait pola mengasuh anak yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral. Sayang, pola asuh ini kian tergerus modernisasi.

Fenomena ini masih sering terjadi di Timor Tengah Utara (TTU). Muncul keinginan agar para orang tua dan guru kembali menerapkan kearifan lokal yang mengedepankan nilai-nilai budaya dalam pola asuh anak. Karena itu mereka “mendirikan” Skol Amnasit yang secara harafiah berarti sekolah bagi para orang tua.

Pertumbuhan karakter positif di rumah sangat didukung oleh keberadaan orang tua dan nilai-nilai budaya yang dianut keluarga. Di kalangan orang Dawan di Timor, penerapan nilai-nilai budaya ini sudah ada dan dilakukan turun-temurun dengan bercerita ketika berkumpul bersama. Hanya sayang mulai pupus oleh kemajuan zaman dan teknologi.



Pertemuan bersama empat kelurahan Skol Amnasit untuk mengingatkan kembali materi pola asuh dengan lima prinsip Skol Amnasit (Dokumentasi WVI AP TTU)



“Sekarang kalau keluarga berkumpul pasti nonton sinetron di televisi,” kata Simson Otniel, Koordinator Program Pendidikan WVI. Menurut Simson yang akrab dipanggil Sonny ini, mula-mula WVI menginisiasi program Sekolah Ramah Anak pada tahun 2015. Baru pada tahun 2016-2017 WVI menggali kearifan lokal mengasuh anak.

Jangan bayangkan ruang kelas dalam Skol Amnasit. Yang dilakukan adalah pendampingan rutin, baik kepada kelompok orang tua, guru, anak, pemerintah desa, gereja dan dinas-dinas terkait.

“Yang kami dampingi secara rutin adalah orang tua, guru dan anak agar mereka menerapkan pola asuh ramah anak sesuai dengan budaya orang Dawan,” kata Sonny. Pendampingan dilakukan di empat desa yakni Desa Haulasi dan Fatutasu di Kecamatan Miomaffo Barat dan Desa Nimasi dan Oenino di Kecamatan Bikomi Tengah, TTU.



Pendampingan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Haulasi, TTU (Dokumentasi WVI APTTU)

Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam dalam Skol Amnasit diikutsertakan. Demikian pula para kepala sekolah dan guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Dinas Cabang PKO dan gereja.



“Dinas cabang PKO kami libatkan untuk membantu mengawasi dan memastikan para guru membuat RPP dengan menerapkan prinsip Skol Amnasit. Sementara gereja kami libatkan agar materi Skol Amnasit menjadi salah satu bahan yang diajarkan dalam kursus pranikah,” jelasnya.



Pengukuhan Kesepakatan Desa tentang Pendidikan anak di Desa Oenino (Dokumentasi WVIAPTTU)

Bergandeng Tangan

Semangat *Ma Top Ma Fit*, yang berarti bersama bergandengan tangan menggali prinsip-prinsip positif budaya lokal diadopsi untuk mengembangkan Skol Amnasit. Hasil diskusi dengan para tokoh adat menyepakati untuk mengangkat kembali lima prinsip dalam mengasuh anak yakni: *Neksalit, Mepukait, Faineikat, Kuma, dan Pules*.



Neksalit berupa cerita tentang karakter-karakter anak yang didambakan orang tua seperti bertanggung jawab, mandiri, jujur, pekerja keras dan sabar.

Sementara *mepukait* berisi cerita tentang usaha-usaha yang dilakukan orang tua agar anaknya memiliki karakter positif, seperti penerapan pembiasaan-pembiasaan positif dalam rumah. “Misalnya anak laki-laki dan perempuan bisa membantu orang tua mereka mencari pakan ternak, membantu memasak, menjaga adik, dan membersihkan rumah,” kata Sonny.

Fainekat berupa nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Cara ini menjadi media berkomunikasi di antara mereka. Orang tua, kata Sonny, harus memberikan teladan. Pemilihan waktu yang tepat dalam menasehati perlu diperhatikan. Misalnya dilakukan saat makan malam bersama.

Kuma, prinsip ini secara harafiah berarti memberikan sesuatu, bisa berupa materi, kepada anak agar mau melaksanakan tugasnya. “Pemahaman ini harus diubah. Jika anak-anak tidak melakukan tugasnya, orang tua harus punya cara lain agar mereka dengan suka cita mau menuntaskan tugasnya. Tetapi jangan pakai kekerasan, perlu ketegasan. Orang tua harus jeli melihat bakat dan hobi anak. Jadi bujukan dan rayuannya dapat berupa kegiatan yang menyenangkan bersama anak,” jelas Sony.

Pules, berarti orang tua memuji anak jika menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pujian tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka. “Ini yang paling pelit dilakukan orang Dawan. Tapi bisa diubah sehingga orang tua terbiasa memberikan kata-kata pujian, senyuman atau acungan jempol kepada mereka. Jika mungkin berikan sebuah pelukan hangat atau ciuman sayang kepada anak-anaknya,” kata Sonny.



Dengan prinsip-prinsip ini, kata Sonny, orang tua bisa mengasuh anak-anak mereka dengan menggunakan pola komunikasi positif dan persuasif. Sekarang dari 50 keluarga percontohan di empat desa di atas telah menyepakati jadwal makan malam bersama, waktu belajar, berdoa, menonton televisi, dan waktu istirahat untuk anak-anak mereka.

“Dampak bagi orang tua dan anak adalah hubungan mereka menjadi lebih akrab. Ada canda dan tawa dalam makan bersama. Anak jadi betah di rumah. Orang tua memberi kesempatan atau mendengarkan pendapat anak. Anak menjadi lebih sopan. Anak mandiri. Orang tua bangga,” ujar Sonny.

Seperti yang dituturkan Mama Margareta Siki dari Desa Nimasi, “Anak saya Riky, sekarang sudah berubah. Tidak seperti dahulu lagi. Sebelumnya dia mengalami kesulitan dalam belajar karena saya tidak mendampingi belajar. Setiap malam Riky hanya nonton TV di rumah tetangga. Tetapi setelah saya selalu mendampingi, Riky banyak mengalami kemajuan. Menulis dan membacanya semakin baik. Riky sekarang selalu belajar sebelum nonton TV,” kata dia.

Jika anak-anak tidak melakukan tugasnya, orang tua harus punya cara lain agar mereka dengan suka cita mau menuntaskan tugasnya. Tetapi jangan pakai kekerasan dalam menghadapi anak

Becy Mnaka, ibunda Fatu Apolinaris mengatakan dalam bahasa Dawan: “*Fe unu nbi hai umele nanan Hai mui lasi sunu... mok hai anhini.... Nafe’es hai mi’ sunu lian’in ni.... mes nafe’es hai anhini msat.... na’sunu kai.... fun natuin hai kam baetfa mepu.*” Ia mengatakan, dahulu hubungan mereka dalam keluarga tidak harmonis. Ada iri hati. Orang tua marah



terhadap anak. Anak-anak balik marah. Semua ini terjadi karena belum ada pembagian tugas.



Desi Fobia sedang mencuci piring membantu ibunya agar menjadi kebiasaan positif (Dokumentasi WVI AP TTU)

Bagio, peserta Skol Amnasit desa Haulasi mengatakan, “Anak-anak sebenarnya baik dan rajin-rajin. Hanya orang tuanya yang kurang dekat dan bersahabat dengan mereka. Keadaan ini membuat anak tidak betah di rumah. Mereka lebih senang nongkrong di jalan atau di *deker*. Orang tua seharusnya menjadi sahabat bagi anak-anaknya,” kata dia.

Pendampingan terhadap Skol Amnasit dilakukan sebulan sekali. Satu kelompok beranggotakan 20 keluarga. Mereka berbagi cerita dan pengalaman mendidik anak-anaknya di rumah. Dalam pertemuan itu para orang tua bermain peran melakoni keseharian di rumah mereka untuk saling memperkaya antara anggota Skol Amnasit.



Sirilus Kefi, anggota Skol Amnasit dari Desa Nimasi menuturkan, “Saya tergugah dengan setiap tema yang selalu kami diskusikan. Selama ini saya selalu mengambil sikap diam jika ada masalah dalam keluarga. Tapi hari ini saya dicerahkan. Tidak selamanya diam itu baik. Lingkungan keluarga akan memengaruhi pertumbuhan anak. Doa dan Firman adalah kekuatan untuk menjaga anak-anak.”

Peserta Skol Amnasit dari Desa Haulasi, Aleks Toan juga menegaskan agar orang tua jangan mengancam atau memarahi anak jika tugas yang diberikan kepadanya tidak selesai. Ancaman akan menimbulkan ketidakpercayaan anak terhadap orang tuanya. “Kita juga sebagai orang tua harus mampu menuntun dan membangun pertumbuhan iman anak-anak kita,” ujar Aleks.

Orang tua jangan mengancam atau memarahi anak jika tugas yang diberikan kepadanya tidak selesai. Ancaman akan menimbulkan ketidakpercayaan anak terhadap orang tuanya.

Skol Amnasit menurut Sonny, menjadi model bagi keluarga lain yang tidak tergabung di dalamnya. Hubungan harmonis dalam keluarga akan menjadi panutan bagi tetangga mereka.

Tapi menerapkan prinsip ini juga penuh tantangan. Seperti cerita Mama Fransiska Nahas, peserta Skol Amnasit Desa Haulasi: “Kami orang tua sebenarnya berusaha untuk terapkan 5 prinsip ini. Tapi seringkali kami lalai karena terbawa emosi sehingga terkadang marah-marah sama anak.”

Karena itu Aleks Toan dari desa Haulasi sangat giat mempromosikan prinsip-prinsip ini. Dengan semangat beliau mengajak para guru Sekolah SMPN Haulasi dan aparat desa Haulasi untuk mendidik anak di sekolah dan di rumah dengan 5 prinsip di atas.

Selain dengan orang tua, guru dan anak, WVI juga bekerja sama dengan tiga paroki yakni Paroki Oeolo, Bijaepasu dan Naiola. Yang



disasar adalah peserta kursus pra-nikah. WVI ingin lima prinsip Skol Amnasit ini dimasukkan sebagai materi kursus.



Makan malam bersama sebagai media untuk parenting dalam Keluarga Alex Toan (Dokumentasi WVI APTTU)

“Pastor dan Dewan Paroki sangat senang. Mereka menilai prinsip-prinsip di atas sangat baik untuk mendidik anak,” ucap Sonny. Sampai dengan bulan September 2017, sebanyak 256 pasang calon pengantin sudah mendapatkan sosialisasi prinsip Skol Amnasit.

Dampak Skol Amnasit

Sampai dengan September 2017, 79 persen dari 80 keluarga peserta telah secara rutin menerapkan prinsip-prinsip Skol Amnasit dalam mendidik anak-anak mereka. Sementara 21 persen sisanya belum secara rutin menerapkannya.

Para anggota kelompok juga selalu saling menguatkan. Yakobus To dari Skol Amnasit Desa Oenino mengatakan, “Saya punya anak-



anak selalu mendapat *Fainekat*, dan mereka berubah. Sebelumnya malas, sekarang sudah membantu kami sesuai dengan tugasnya. Kalau mau baik nantinya, biasakan anak-anak sejak dini dengan hal yang positif,” kata dia.

Hal senada diungkapkan oleh Mama Sarah Lasfeto dari Desa Haulasi: “Saya sekarang sudah bisa lebih sabar. Tidak mudah terbakar emosi lagi. Perubahan ini membuat anak-anak betah di rumah. Mereka rajin dan sudah tahu dengan tugasnya masing-masing. Saya bahagia, anak-anak juga.”

Begitu pula dengan Regina Sife, ibunda Getrudis Bnana, anggota Skol Amnasit dari Desa Nimasi. Ia mengatakan selalu berusaha menerapkan prinsip *Kuma* dan *Fainekat* jika putrinya lalai mengerjakan tugas-tugas. “Hubungan saya dengan dia juga lebih dekat. Kalau dulu, saya sering marah-marah. Hubungan kami menjadi renggang. Tapi sekarang kami sangat dekat. Hubungan dalam keluarga menjadi harmonis,” ujarnya.

Sampai dengan
September 2017, 79%
dari 80 keluarga
peserta telah secara
rutin menerapkan
prinsip-prinsip Skol
Amnasit dalam mendidik
anak-anak mereka.

Vera Sasi anggota kelompok kerja (Pokja) anak SDN Fatutasu senang dengan prinsip-prinsip pola asuh di atas. “Mama sekarang tidak gampang marah dan pukul saya lagi. Saya bahagia,” ujarnya sumringah.

Antonia Toan, anggota Pokja Anak Haulasi juga mengungkapkan kebanggaannya: “Saya senang, kami selalu makan malam bersama dan diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak. Beliau sekarang tidak emosional, tapi lebih tegas. Mama juga lebih banyak tersenyum,” ujarnya.



Anak Kelompok Kerja (Pokja) SDN Lilkole sedang mengenal tanaman apotik hidup yang ada di sekitarnya (Dokumentasi WVI AP TTU)

Hingga saat ini Dinas PKO terus menggalakkan KKG dan K3S sebagai wadah peningkatan kapasitas guru dan Kepala Sekolah dengan prinsip-prinsip Skol Amnasit. Demikian pula dalam pertemuan rutin KKG Pendidikan Agama Katolik (PAK) untuk wilayah Bikomi dan Miomaffo Barat.

“Guru-guru PAK diwajibkan membuat RPP dengan semangat prinsip Skol Amnasit untuk setahun,” kata Sonny.

Sebanyak 63 KK di empat desa terus menerapkan prinsip-prinsip Skol Amnasit dalam pengasuhan anak-anak mereka. Dua di antaranya, kata Sonny, telah membuat kesepakatan desa tentang pendidikan anak-anak dengan prinsip Skol Amnasit. ***



“Terkadang saya berpikir, kenapa anak mengalami kekerasan dan kebanyakan pelakunya orang dewasa? Seharusnya orang dewasa melindungi anak-anak, bukan membuat anak-anak kehilangan masa depannya.”

*Farida
Kader perlindungan anak
di Bengkayang, Kalimantan Barat*

*Praktik Cerdas dari Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat*

Tak Ada Lagi BAB di Sungai dan Kebun



Salah satu tantangan pembangunan sanitasi lingkungan di Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat adalah perilaku sebagian penduduk yang terbiasa Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat, termasuk ke sungai yang sumber airnya dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi dan memasak. Kebiasaan yang dianggap lumrah ini harus ditangani melalui intervensi terpadu dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Selama puluhan tahun, hampir semua keluarga di empat desa di Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, belum memiliki jamban. Warga terbiasa melakukan kebiasaan BABS di sembarang tempat.

Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Kecamatan Sungai Betung. Setiap musim hujan datang, penyakit diare akan segera menyerang anak-anak di empat desa di sana yakni Desa Suka Maju, Desa Suka Bangun, Desa Karya Bhakti dan Desa Cipta Karya.

Data Kecamatan Sungai Betung pada tahun 2014 menyatakan, baru 899 KK atau 38 persen warga yang memiliki jamban. Sementara sisanya 1.443 KK atau 62 persen tidak memiliki jamban. Sehari-hari warga terbiasa BAB di sungai, hutan, dan kebun di sekitar desa.

“Berdasarkan data dari Puskesmas Sei Betung, diare selalu masuk empat besar dalam daftar penyakit yang menyerang anak-anak di Sungai Betung setiap tahun. Penyebabnya adalah karena BABS itu,” kata Timotius Winner Fasilitator Lapangan WVI yang melakukan pendampingan di sana.

Dianggap Lumrah

BABS masih terjadi di desa-desa di Kecamatan Sungai Betung karena warga belum menyadari pentingnya sanitasi lingkungan dan higiene pribadi. Mereka masih beranggapan hanya orang berada yang wajib punya jamban. Sementara mereka yang rata-rata petani, tidak ada keharusan.

“Warga biasanya bilang, rumah tinggal saja saja masih belum layak bagaimana bikin jamban? Masih banyak juga warga yang menganggap membangun jamban mahal. Sehingga mereka lebih enak buang tinja di sungai. Apalagi kata warga tinja dapat menjadi pakan ikan dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun,” kata Ucok P. Hasugian, Camat Sungai Betung.



Tahun 2013, pemerintah bersama masyarakat dan Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan pendekatan agar warga bisa mengubah perilaku BABS melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan.

Terlebih dahulu sosialisasi dilakukan kepada camat, kepala desa, staf kecamatan, tokoh agama, pemerintah desa serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat tentang prinsip-prinsip sanitasi berbasis masyarakat untuk pilar STOP BABS. Kegiatan ini juga melibatkan kader Posyandu. Sosialisasi yang sama dilakukan pula ke sekolah-sekolah. Sasarannya adalah murid dan guru.



Sambutan Ketua Panitia Bapak ST Salikin, sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Bengkayang pada Deklarasi Stop BABS (Dokumentasi WVI AP Bengkayang)



Usai sosialisasi kepada pemerintah, tokoh agama dan masyarakat dilakukan, pendekatan partisipatif kepada warga mulai dilaksanakan. Karena itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, puskesmas, polsek, babinsa, bappeda, Dinas Kesehatan dan dinas PU bergandeng tangan sejak mulai pemicuan pada tahun 2012.

Pendekatan partisipatif yang dimaksud adalah, memberikan gambaran mengapa anak-anak mereka selalu diserang diare. Penyebab utamanya adalah sanitasi lingkungan terganggu akibat perilaku buang air besar sembarangan.

Tujuan akhir dari pemicuan tadi, kata Ucok, warga bisa mengubah perilaku dan cara pandang tentang sanitasi lingkungan. Selain itu, kata dia, pendekatan tersebut bisa memicu mereka untuk membangun jamban dengan inisiatif sendiri.



Kepala Desa di Kecamatan Sungai Betung sedang membacakan deklarasi ODF yang diikuti seluruh masyarakat yang hadir (Dokumentasi WVIAP Bengkayang)



“Warga diajak menyadari bahwa kebiasaan buang air besar sembarangan adalah masalah bersama karena berimplikasi kepada masyarakat luas. Sehingga pemecahannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Jalan keluarnya harus bikin jamban secara gotong-royong,” kata Ucok.

Bangun Solidaritas

Setelah sosialisasi yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, tahap berikutnya adalah pelatihan untuk fasilitator, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Tujuannya, setiap desa dan kecamatan memiliki fasilitator yang terampil.

Salah satu faktor penting dalam pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah timbulnya solidaritas antar warga untuk meninggalkan kebiasaan buruk BABS. Karena itu kepala desa, aparat desa, tokoh agama, pemerintahan kecamatan dan tokoh masyarakat punya peranan besar dalam mengkondisikan timbulnya solidaritas tersebut.

“Salah satu faktor penting dalam pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah timbulnya solidaritas antarwarga.”

“Salah satu faktor penting dalam pendekatan STBM adalah timbulnya solidaritas antarwarga,” kata Ucok.

Pada tingkat kecamatan dan desa dibuat kesepakatan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Pertama, semua perangkat desa dan kecamatan harus memberi contoh dengan membangun jamban keluarga



(WC) di rumah masing-masing. Kedua, rapat koordinasi bulanan wajib dilaksanakan yang dihadiri antara lain oleh kepala desa dan perangkatnya serta tokoh masyarakat, untuk membahas pelaksanaan dan kemajuan pembangunan jamban keluarga di setiap desa.

Peran pemimpin menjadi sangat strategis untuk menjadi teladan bagi warga. Kerja bakti pembangunan WC pun langsung dipimpin oleh kepala desa dan camat. Tak jarang camat Sungai Betung bersama aparat desa menginap di dusun yang menjadi target.

Warga menyiapkan material selain besi, semen dan kloset. Tiga bahan ini dibeli dengan bantuan dari pemerintah sebesar Rp500 ribu per KK.

Partisipasi warga di empat desa di Kecamatan Sungai Betung menurut Timotius memang paling tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya yang didampingi WVI Singkawang.

“Sungai Betung yang paling merespon untuk program ini. Kemudian pemerintah desa dan kecamatan juga sangat mendukung,” ujarnya.

“Dusun Sebakak di Desa Suka Bangun telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) atau Stop BABS. Kini warganya seratus persen telah memiliki jamban di rumah masing-masing.”



Pembuatan toilet dan septik tank di salah satu dusun dampingan (Dokumentasi WVI AP Bengkayang)



Penyambungan saluran pembuangan dari wc ke septik tank (Dokumentasi WVI AP Bengkayang)



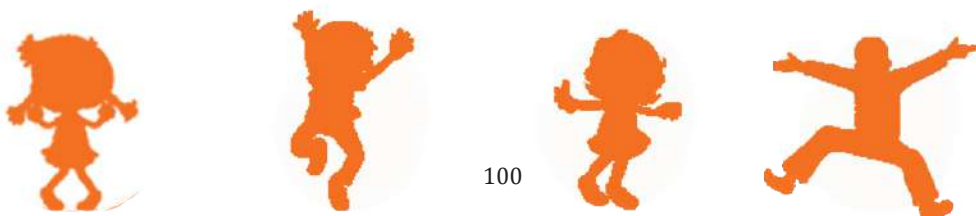
Salah satu toilet warga yang baru selesai dibangun (Dokumentasi WVI AP Bengkayang)



Tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan dalam rangka memastikan bahwa semua warga sudah memiliki jamban sehat (Dokumentasi WVI AP Bengkayang)



Setelah berproses selama kurang-lebih empat tahun, masyarakat menuai hasil kerja keras mereka. Dusun Sebak di Desa Suka Bangun misalnya telah mendeklarasikan program STOP BABS atau *Open Defecation Free* (ODF). Kini warganya 100 persen telah memiliki jamban di rumah masing-masing. Tidak ada lagi warga yang BABS di sungai atau kebun. ***



Kota
Singkawang



**“Setiap hal besar dimulai dari satu langkah kecil.
Dan hari ini kita melangkah pada pijakan pertama,
mengakhiri kekerasan terhadap anak, dimulai dari
kita, dimulai dari saya.”**

Doseba Tua Sinay
CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia
(Disampaikan pada peluncuran kampanye PKTA Wahana
Visi Indonesia, Mei 2017)

Praktik Cerdas dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat

Sekolah Harmoni Hijau Singkawang



Pemerintah Kota Singkawang bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan mitra-mitra peduli pendidikan menginisiasi pendidikan kontekstual Sekolah Harmoni Hijau (SHH) Singkawang. Pendidikan karakter melalui “tiga harmoni” dikedepankan, yakni harmoni diri, harmoni sesama dan harmoni dengan alam.



SHH adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran dengan konteks alam, budaya dan kearifan lokal, untuk menanamkan karakter positif pada siswa agar dapat hidup harmoni dengan dirinya, sesama dan alam. Keseluruhan proses pembelajaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi anak dan peran serta masyarakat.

Bertepatan Singkawang adalah kota multikultur, sehingga metode SHH dirasa cocok diterapkan di sini. Warga berasal dari berbagai suku seperti Dayak, Tionghoa, Melayu, Jawa, dan suku-suku lainnya. Agama mereka pun berbeda-beda. Ada yang menganut Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu. Tetapi anak-anak mereka bisa bersekolah di tempat yang sama, belajar bersama dengan para guru yang kebanyakan muslim dan berdarah Melayu. Tak heran jika ada siswa dari suku Tionghoa bisa melafalkan doa Islam dan sebaliknya siswa dari suku Melayu yang fasih berbahasa Khek, yaitu bahasa asli suku Tionghoa di Kota Singkawang.

“Walaupun warga masyarakat kota Singkawang terdiri atas berbagai suku, ternyata mereka mampu membangun dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Tidak ada sekat-sekat yang mengkotak-kotakkan mereka berdasarkan latar belakang suku dan agama. Kenyataan ini bisa dilihat di lingkungan sekolah negeri di Kota Singkawang,” kata Fransisco Fernando, Koordinator Pengembangan Masyarakat WVI.

Pelestarian alam dan budaya

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dalam model SHH mendekatkan siswa dengan alam dan budayanya. Karena itu lingkungan sekolah ditata untuk mendukung pelestarian alam dan budaya.

Hal tersebut dilakukan untuk menjawab isu degradasi lingkungan. Singkawang mempunyai berbagai potensi alam sebagai tujuan wisata.



Namun penambangan liar dan penebangan hutan telah menggerogoti alamnya. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, model SHH menjadi salah satu jawaban. Kecintaan terhadap alam ditanamkan sejak dini kepada generasi mudanya.

Penanaman karakter positif pada model SHH mengacu pada tiga nilai harmoni yakni, harmoni diri, harmoni sesama dan harmoni dengan alam yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.



Harmoni dengan alam. Siswa menanam pohon untuk menjaga kelestarian alam (Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)

Harmoni diri akan tercipta ketika individu mengenal siapa penciptanya. Pengenalan akan Pencipta memungkinkan mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap alam semesta yang ditinggalinya.

Demikian halnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Harmoni dengan sesama menekankan perilaku hidup berdampingan dengan orang lain dan saling menghargai.



Harmoni dengan sesama. Perbedaan suku, agama, ras dan budaya tidak menjadi penghalang untuk bergaul akrab antar sesama teman



Sementara harmoni dengan alam menuntut manusia menghargai alam lingkungannya sebab keperluan hidupnya bersumber dari alam. Tanpa peduli pada alam dan makhluk-makhluk hidup di dalamnya, sebetulnya manusia sedang merusak kehidupannya sendiri.

“Penerapan SHH ini sangat bagus karena menciptakan karakter baik pada siswa. Mereka juga dapat berpikir dan bertindak kontekstual bagaimana berhubungan Tuhan, memelihara alam dan mempertahankan budayanya,” kata Ni Wayan Wiwiek Apriani, Guru Penebar yang kini menjadi Kepala SD Negeri 71 Singkawang.

Penanaman karakter ini sejalan dengan Pendidikan Karakter yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Sembilan karakter harmoni hijau yang dikembangkan pada model SHH merupakan karakter yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak, yakni; taqwa, disiplin, mandiri (harmoni diri), empati, menghargai, kerjasama (harmoni sesama), bersih, rapi, dan peduli (harmoni alam).



SDN 04 Singkawang Utara mengadakan belajar yang bermakna dan menyenangkan di luar kelas (Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)



Metode Hijau

Mengembangkan model SHH memerlukan dua aktivitas yang saling terkait satu sama lain, yakni olah isi dan olah suasana.

Olah isi mencakup segala hal yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum dan pengembangan metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif bagi anak-anak.



Menciptakan pembelajaran yang dekat dengan anak lewat bermain
(Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)



Pendidikan kontekstual hijau menanamkan karakter positif agar siswa dapat hidup harmoni dengan diri serta Pencipta, sesama dan alamnya (Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)

Karena itu dikembangkan Metode Hijau dengan pembelajaran SERU (Senang, Efektif, Ramah dan Unik). Tercakup di dalamnya penggunaan metode pembelajaran dari alam dan lingkungan sekitar, pengembangan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP) yang kreatif dan kontekstual, serta pengintegrasian karakter harmoni ke dalam pembelajaran.

Alam menjadi media dan objek belajar demi membangun kepedulian anak. Sebab, jika alam adalah media dan objek belajar, maka merusaknya berarti menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan media dan objek belajar yang terbaik dan tidak terbatas.

Tujuan Metode Hijau adalah agar anak termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah, apalagi merasa terbebani atau takut. Anak harus terus dimotivasi agar bereksplorasi, kreatif dan bereksperimen dalam pembelajaran.



Ramah Anak

Pembelajaran juga harus ramah terhadap anak. Anak menjadi pusat pembelajaran. Belajar bukan lagi sebuah proses memaksakan pikiran orang dewasa dan monopoli guru. Partisipasi anak harus dibangun. Anak perlu mendapat kesempatan untuk menyampaikan, mendiskusikan, dan menyimpulkan temuan-temuan, imajinasi, dan kreativitasnya.

Bagi para guru, Metode Hijau dengan pembelajaran SERU ini membuat mereka lebih mudah mengajar. Guru tidak lagi berdiri di depan kelas dan mendikte siswa.

“Bedanya dengan cara mengajar konvensional adalah guru tidak perlu banyak ceramah. Dalam metode SHH, siswalah yang berperan aktif. Mereka akan kreatif dan menemukan sendiri. Siswa juga lebih dekat dengan alam lingkungan karena di SHH siswa banyak belajar di luar kelas. Menyatu dengan alam,” kata Wiwiek.

Setelah olah isi, giliran olah suasana yang mencakup segala upaya untuk mewujudkan lingkungan sekolah kondusif dan mendukung pembelajaran. Ruang kelas harus nyaman dan ramah anak. Lingkungan sekolah ditanami agar lebih hijau dan inspiratif, serta kegiatan-kegiatan untuk mengkampanyekan karakter harmoni hijau.

Suasana aman dan nyaman diciptakan agar siswa lebih betah dan berkonsentrasi dalam belajar.

Menurut Wiwiek, suasana aman dan nyaman diciptakan agar siswa lebih betah dan berkonsentrasi dalam belajar. Kehadiran mereka pun meningkat.



Ruangan kelas yang mendukung pembelajaran berpusat pada anak dengan menstimulasi segala indera (Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)



“Siswa harus merasa nyaman saat belajar. Misalnya tempat duduk diatur sesuai keinginan siswa. Karya anak dipajang di dalam kelas sehingga mereka merasa *at home*. Sementara di luar kelas penataan taman sekolah dilakukan supaya tampak indah dan tidak gersang. Lalu para guru mengajar dengan pembelajaran SERU,” kata Supriadi Saman, Fasilitator Pengembangan WVI untuk SHH.



Formasi tempat duduk siswa yang tidak konvensional muka-belakang, namun melingkar (Repro Buku Sekolah Harmoni Hijau Singkawang)

Replikasi SHH

Ketika program ini berakhir pada tahun 2016, model SHH telah direplikasi kepada 20 sekolah lainnya, dari dua sekolah percontohan, di empat kecamatan di kota Singkawang.

“Semua SD Negeri. Sementara guru yang sudah mendapatkan pelatihan model SHH mencapai 300 orang,” jelas Wiwiek.



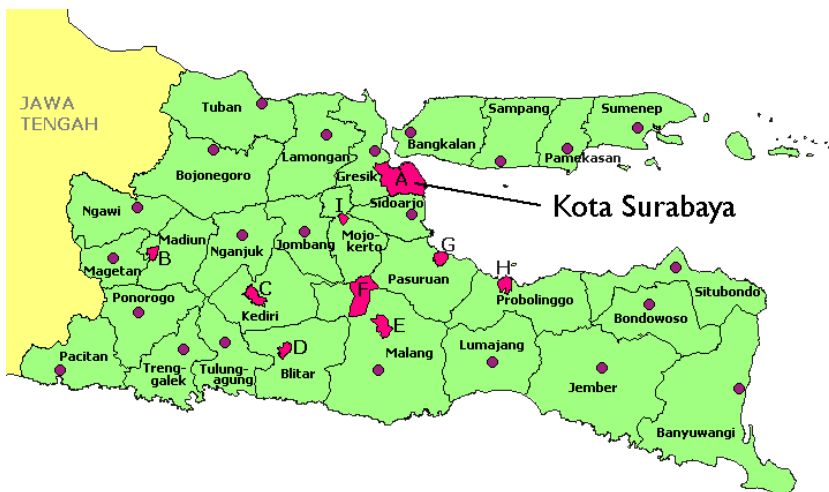
Menurut Supriadi, Pemkot Singkawang saat ini tidak secara khusus melanjutkan replikasi SHH sebab metode ini sudah terintegrasi ke dalam Kurikulum 2013 (K-13).

“Sudah terintegrasi ke dalam K-13. Guru-guru yang sudah dilatih sebagai Tim Penebar sekarang pun sudah lebih disibukkan dengan program K-13 ini,” kata Supriadi yang kini menjadi pendamping Forum Anak di Singkawang.

Dari segi keberlanjutan, Pemerintah Kota Singkawang telah mengeluarkan peraturan wali kota No.11 tahun 2015 tentang pendidikan Harmoni Hijau kota Singkawang, sehingga menjadi acuan dalam penganggaran program APBD di tahun-tahun mendatang oleh dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

Model SHH menurut Supriadi sangat tepat diterapkan di Singkawang maupun di daerah lain karena sangat membantu guru menemukan metode pembelajaran yang menyenangkan.

“Bagi guru yang sudah mendapatkan pelatihan SHH tidak akan mengalami kesulitan dengan adanya K-13. Apa yang dilatihkan di SHH sudah meliputi semua yang ada dalam kurikulum tersebut,” aku Supriadi.***



**“Mari kita buktikan pada dunia bahwa kalian bisa,
kalian adalah cucu para pejuang yang tidak pernah
ada kata menyerah. *Where there’s a will, there’s a way.*”**

Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya
(disampaikan pada Sosialisasi Dinamika Kenakalan Remaja
oleh Pemkot Surabaya di SMPN 8,
tanggal 15 Februari 2018)

Praktik Cerdas dari Kabupaten Surabaya, Jawa Timur

Child Friendly Resilient City (CFRC)

Penanggulangan Bencana Berbasis Sekolah
dan Masyarakat



Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Unicef dan Pemerintah Kota Surabaya melahirkan model penanggulangan bencana berbasis sekolah dan masyarakat, untuk meningkatkan ketangguhan anak dan warga serta mengurangi tingkat risiko bencana.



Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Populasi anak di Surabaya mencapai 30 persen dari seluruh jumlah penduduk yang mencapai 3,1 juta orang (Agustus 2017). Berarti hampir satu juta warga Surabaya adalah anak-anak.

Meskipun Surabaya telah menyandang Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya hingga nindya sejak tahun 2011, tidak berarti kota ini bebas dari masalah anak. Salah satu persoalannya adalah pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dan pesisir Surabaya oleh gerak urbanisasi dan pembangunan. Masyarakat yang tinggal di sana kesulitan mengakses kesehatan, pasokan air bersih dan terkena risiko bencana seperti banjir dan penyakit, termasuk anak-anak di dalamnya.

Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terkena dampak bencana. Karena itu diperlukan aksi untuk meminimalkan dampak bencana. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan, baik dalam keadaan normal maupun dalam situasi bencana. Program mitigasi bencana yang dilakukan perlu memasukkan pertimbangan anak di dalamnya.

Peristiwa bencana besar di beberapa negara menunjukkan bahwa anak usia sekolah banyak yang menjadi korban, baik ketika mereka masih berada di sekolah maupun setelah di luar sekolah. Karena itu, pengetahuan tentang bencana dan penanggulangan risiko bencana penting diajarkan sejak dini untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi ancaman di sekitarnya.

Walaupun tentang bencana tidak masuk ke dalam kurikulum, mengingat beban yang berat pada siswa karena tuntutan ujian nasional, setidaknya pelatihan kebencanaan dapat diajarkan agar anak sekolah bisa sadar bencana.

“Proyek *Child Friendly Resilient City* (CFRC) bertujuan mempersiapkan anak dan masyarakat agar tanggap bencana. Program ini dilakukan



pada dua kelurahan yakni Kelurahan Sidodadi dan Simolawang serta dua sekolah sebagai proyek percontohan,” ujar Willy Sitompul yang saat itu menjabat Manajer Area Program WVI Surabaya.

Proyek Child Friendly Resilient City (CFRC) bertujuan mempersiapkan anak dan masyarakat agar tanggap bencana.

Proses peningkatan kapasitas dilakukan bersama Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemkot Surabaya dan warga antara lain belajar tentang Desiminasi Peta Risiko Fokus Anak dan pelatihan penggunaan Metode Kajian Risiko Iklim Fokus Anak.

Kajian Risiko Iklim Fokus Anak dilakukan bersama Gugus Tugas

KLA dan Pemkot Surabaya, yang dimanfaatkan untuk penyusunan langkah adaptasi perubahan iklim fokus anak. Kajian Risiko ini pula ikut mendukung perencanaan pembangunan Kota Surabaya.



FGD Lintas sektoral pemkot Surabaya (Dokumentasi WVI AP Simokerto, Surabaya)



Diskusi SOP Penanggulangan Bencana Kelurahan Simolawang (Dokumentasi WVI AP Simokerto, Surabaya)



Pelatihan PB untuk kelompok remaja Kelurahan Sidodadi dan Simolawang (Dokumentasi WVI AP Simokerto, Surabaya)



Willy mengatakan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dan anak-anak yang tinggal di Sidodadi dan Simolawang dapat menghadapi berbagai jenis bencana.

“Kami telah membentuk dua tim tanggap bencana berbasis sekolah dan dua tim tanggap bencana berbasis masyarakat,” kata Willy. Ia menambahkan bahwa program tersebut menargetkan 38.208 penerima manfaat di dua desa dan dua sekolah tadi.

Sekolah Tanggap Bencana

Tanggap bencana di sekolah berisi rangkaian kegiatan seperti kajian risiko oleh anak-anak, peningkatan kapasitas guru dalam mengkontekstualisasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam Rencana Pembelajaran Sekolah.

“Pembentukan Sekolah Tanggap Bencana setelah berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Simokerto Surabaya. Yang kami lakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan tentang sekolah aman bencana dan pembuatan SOP penanggulangan bencana,” jelas Nurul Hidayah, CFRC Project Coordinator WVI.

Sementara materi yang disampaikan ke sekolah, menurut dia, antara lain *workshop* guru tentang pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat terintegrasi antara Adaptasi Perubahan Iklim dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), SOP tentang kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana, pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB), kapasitas tim Sekolah Siaga Bencana, simulasi banjir bersama warga sekolah dan pelatihan fotografi anak.

“Dalam pelatihan kami diajari untuk mengetahui jalur yang aman bila ada bencana, cara mengobati teman yang terluka dan menolong warga.



Juga diajari mengabsensi semua siswa, menyelamatkan dokumen siswa, membuat peta bencana dan membunyikan tanda bahaya,” Wacahyani, siswa SDN Sidodadi 2 Surabaya.

Para guru menyambut baik program CFRC karena dinilai sangat bermanfaat. Siswa yang mendapatkan pelatihan paham bagaimana melakukan tanggap bencana.

“Sebelum ada program ini, anak-anak bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa jika terjadi bencana. Tapi setelah mendapatkan

“Dalam pelatihan kami diajari untuk mengetahui jalur yang aman bila ada bencana, cara mengobati teman yang terluka dan menolong warga.

pelatihan-pelatihan, mereka jadi tahu ‘oh ya, ketika curah hujan tinggi dan tidak kunjung reda kemungkinan nanti terjadi banjir’. Sehingga mereka sudah bersiap-siap,” Hestiani Iswari, Guru SDN Sidodadi 2 Surabaya. Selain murid reguler, pelatihan juga melibatkan siswa-siswa berkebutuhan khusus.

Sebelum mendapat pelatihan, kata Nurul, informasi tentang kesiapsiagaan bencana dianggap tidak penting. Pengetahuan tentang materi kebencanaan juga sangat minim. “Guru dan murid mempunyai pandangan bahwa lingkungan sekolah selalu aman dari bencana karena mereka belum tahu tentang perubahan iklim dan dampaknya,” kata Nurul.

Tetapi setelah mendapatkan pelatihan terkait tentang kebencanaan (*Disaster Risk Mangement and Disaster Risk Reduction*) warga sekolah dalam hal ini Kepsek, guru, murid, satpam, penjaga kantin, tukang kebun dan komite sekolah, menganggap hal tersebut sangat penting. Bahkan guru diajarkan secara sederhana untuk membuat kegiatan materi belajar yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dampaknya.



“Ada perubahan pola pikir untuk mewujudkan sekolah aman dari bencana,” kata Nurul.

Kegiatan ekstra kurikuler pramuka, kata dia, memasukkan unsur materi sekolah aman bencana. Dalam proses belajar-mengajar materi perubahan iklim selalu dikaitkan. Sekolah juga menciptakan lagu bernuansa sekolah aman bencana. Ada program Jumat Bersih dengan cara semua siswa diminta untuk mencari sampah dan memilah sampah kering dan basah untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang telah disediakan. Simulasi bencana dilakukan sebulan sekali.



Diskusi kelompok murid laki-laki tentang prosedur penanggulangan bencana (Dokumentasi WVI AP Simokerto, Surabaya)

Standar operasi juga disepakati. Apabila terjadi banjir, tim sekolah siaga bencana segera bertindak, peringatan dini dilakukan, jalur evakuasi ditentukan dan sarana-prasarana untuk Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) dengan melibatkan tim dokter kecil yang sudah terbentuk disediakan.



Kelurahan Tangguh Bencana

Selain fokus kepada anak, program ini juga diupayakan mendukung program pemerintah kota Surabaya mengembangkan kelurahan tangguh bencana yang mandiri, mampu dan cepat beradaptasi saat prabencana, dan tanggap darurat pasca bencana.

Artinya, warga siap siaga dengan cara dilatih, diberi pemahaman dan disiapkan sarana serta prasarana. Ketika bencana terjadi, masyarakat bisa menolong diri sendiri dengan cara menetapkan tindakan dan menentukan prioritas kebutuhan. Dan pada saat pascabencana, masyarakat bisa secara mandiri melakukan pemulihan.

Karena itu, masyarakat melakukan kajian risiko, pembentukan tim penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pengembangan dokumen rencana kontijensi, peningkatan kapasitas bagi tim penanggulangan bencana berbasis masyarakat termasuk pertolongan pertama gawat darurat dan pertolongan di air, simulasi tanggap darurat dan mitigasi bencana dengan membersihkan sungai dan memberikan penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Widodo, ketua Tim Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (TPB2M) Kelurahan Simolawang dan anggota tim manajemen bencana berbasis masyarakat mengatakan, tim dan warga telah menyiapkan rencana darurat sehingga mereka akan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana.

“Kami memeriksa rencana kontinjensi, kemudian kami melakukan simulasi untuk mengetahui apakah rencana kontinjensi sesuai atau tidak,” kata Widodo.

Dia juga menjelaskan bahwa timnya turun tangan sendiri melakukan upaya mitigasi bencana seperti membersihkan sungai, pelatihan, dan menempatkan tanda-tanda di masyarakat tentang bagaimana hidup bersih untuk meminimalkan potensi bencana.



Agus Pramono, Kepala Biro Satuan Koordinator Surabaya untuk Manajemen Bencana mengatakan bahwa ia akan mengembangkan program yang diprakarsai oleh WVI dan Unicef ini. “Kami akan mereplikasi manajemen bencana berbasis masyarakat dan manajemen bencana berbasis sekolah di Desa Simolawang dan Sidodadi. Ini adalah model yang bagus,”kata dia.

Dukungan pemerintah sangat tinggi terhadap pembentukan TPB2M. Camat Simokerto memberikan Surat Keputusan (SK) kepada tim dari Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Simolawang sebagai dasar untuk mengambil tindakan apabila terjadi bencana di wilayah mereka.

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Pemkot Surabaya memasukan Kelurahan Simolawang dan Sidodadi menjadi Kelurahan Tangguh Bencana. Karena itu tim dari dua kelurahan ini akan dilibatkan untuk koordinasi rutin secara berkala.



Gladi lapang evakuasi kelompok rentan (Dokumentasi WVI AP Simokerto, Surabaya)



Dinas Sosial Pemkot Surabaya memberikan bantuan informasi tentang alur bantuan apabila ada kejadian atau bencana. Sementara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan informasi tentang mekanisme bantuan dan mengirimkan tim Tagana untuk membantu fasilitasi kegiatan CFRC project.

Bapemas Kota Surabaya memberikan paparan tentang situasi perlindungan anak, Dinas Pendidikan Surabaya menerima usulan dari CFRC project untuk memasukkan materi kesiapsiagaan bencana ke dalam materi muatan lokal (bisa melalui pramuka atau ekstra kurikuler di sekolah).

“Ada banyak dukungan pemerintah. Para dinas misalnya Satlak PB dan Diknas mau memberikan kata sambutan dalam pembuatan buku panduan sekolah aman bencana. Mereka juga memberikan testimoni dalam pembuatan film pendek CFRC Project. PMI dan Tunas Hijau sebagai lembaga mitra, juga siap untuk memfasilitasi apabila dibutuhkan,” terang Nurul.

I Made Utama, mewakili UNICEF, mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan di Surabaya dapat menjadi model untuk kota atau kabupaten lain. Jika program ini terus bergulir, kata dia, dapat diadopsi oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di seluruh Indonesia.

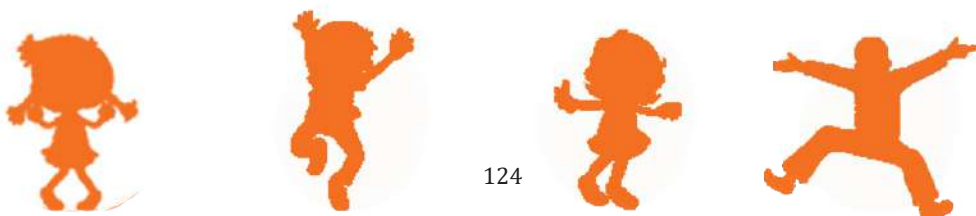
“Sepengetahuan saya belum ada kota atau kabupaten yang telah menerapkan inovasi semacam ini, selain di Surabaya,” kata Utama.

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin mengharapkan bahwa dari dua model sekolah akan ada 250.000 sekolah tangguh bencana dan dari dua desa tangguh bencana akan ada 72.000 desa tangguh di Indonesia.

WVI berharap, dengan proyek CFRC kebutuhan anak terpenuhi pada saat darurat dengan rencana yang lebih dipersiapkan untuk anak,



keluarga dan komunitas. Proyek ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak yang tangguh, di mana terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperbaiki kepentingan anak untuk menjawab indikator kota layak anak terutama pada Klaster Perlindungan Khusus. ***





“Masih banyak yang harus kita lakukan bersama untuk melindungi dan menyejahterakan anak-anak Indonesia.”

Monita Tahalea
Penyanyi

Praktik Cerdas dari Kabupaten Jayapura, Papua

Mengajak Korporasi Mewujudkan Kota Layak Anak



Salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Kelembagaan adalah keterlibatan dunia usaha (korporasi) dalam pemenuhan Hak Anak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menjalin kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) dan jejaring lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Keseriusan Pemkab Jayapura untuk mewujudkan KLA ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Jayapura Layak Anak. Gugus tugas ini dikukuhkan melalui SK Bupati No. 332 Tahun 2014. WVI menjadi salah satu lembaga pendukung di dalamnya.



“Kabupaten Jayapura sangat berkomitmen pada perlindungan anak dan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Bisa dikatakan keinginan mereka berintegrasi dengan apa yang dicita-citakan WVI. Muaranya adalah usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan anak,” kata Wangsit Panglipur, *Area Programme Manager* Wahana Visi Indonesia Kantor Operasional Sentani.

Mengajak Korporasi

Karena itu, diluncurkan Lokakarya Potensi Investasi dan Pengembangan Kampung Ramah Anak Melalui Kerja sama Tripartite yang melibatkan WVI dan masyarakat, pemerintah serta para pengusaha. Melalui pertemuan ini, Pemkab Jayapura, sektor swasta, dan masyarakat lokal diajak untuk terlibat aktif dalam membangun Jayapura sebagai Kota Layak Anak.

Kesempatan itu juga menjadi ajang mengajak sektor swasta, dalam hal ini korporasi, untuk mengembangkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka. Sasarannya adalah pengembangan Kampung Ramah Anak.

“Melibatkan dunia usaha masih jarang dilakukan, padahal potensial mendukung perwujudan KLA. Karena itu salah satu indikator dalam KLA adalah melibatkan korporasi,” kata Wangsit .

Untuk menggugah pihak korporasi, WVI bersama Pemkab Jayapura melangsungkan *talkshow* dan konser Mimpiku untuk Papua di Stasiun Metro TV. Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitouw dalam *talkshow* tersebut menyampaikan komitmen Kabupaten Jayapura memberikan perhatian yang lebih luas kepada kesejahteraan anak. Hasilnya, beberapa korporasi berkomitmen terlibat untuk pengembangan anak-anak di Kabupaten Jayapura.



“WVI bermitra dengan korporasi untuk mengelola program-program bagi kesejahteraan anak di Jayapura,” kata Wangsit.

Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan infrastruktur mendukung program ini, yakni Yayasan Allianz Peduli, PT. Prudential Life Assurance, PT. Tetrasa Geosinindo, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Penjamin Simpanan, dan CrossFit.

Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi sasaran keenam korporasi di atas. Cukup beralasan. Salah satu persoalan utama di sebagian besar wilayah Papua adalah rendahnya kemampuan calistung (baca-tulis-hitung) para siswa SD, di samping masalah kesehatan.

“Anak-anak kelas tiga SD masih banyak yang belum lancar membaca. Sehingga hadirnya Mobil Sahabat Anak dan Perahu Pustaka sumbangan korporasi sangat membantu meningkatkan kemampuan mereka.”

“Anak-anak kelas tiga SD masih banyak yang belum lancar membaca.

Sehingga hadirnya Mobil Sahabat Anak dan Perahu Pustaka sumbangan korporasi sangat membantu meningkatkan kemampuan mereka,” terang Wangsit.

Mobil ini menjangkau kampung-kampung di

wilayah daratan seperti kampung Puai, Nendali, Yokiwa, Ifale, Kehiran, Ifar Besar, Kelurahan Dobon Solo, Sereh, Yobeh, dan Yahim.



“Rata-rata lima kali dalam seminggu kami berkeliling ke kampung-kampung tersebut secara bergiliran. Anak-anak antusias sekali meminjam dan membaca buku-buku yang kami bawa,” kata Wangsit.

Sementara kampung-kampung yang berada di tengah dan pesisir Danau Sentani Seperti Kampung Asei Besar, Ifale, Yoboi, Yobh, Ifar Besar, Khobong, Khameyaka, Kampung Abar, Putali, Homfola, dan Babrongko dijangkau dengan Perahu Pustaka hasil sumbangan PT. Tetrasa Geosinindo, Sarana Multi Infrastruktur, LPS dan CrossFit.

Selain membawa buku-buku, Mobil Sahabat Anak dan Perahu Pustaka juga dilengkapi dengan media elektronik seperti TV dan DVD Player yang menunjang anak-anak bisa menonton film-film tentang ilmu pengetahuan, pendidikan lingkungan dan lagu-lagu anak yang mendidik.



Anak-anak di Kampung Yoboi, Distrik Sentani, sedang membaca buku yang mereka pinjam dari Mobil Perpustakaan Keliling WVI (Dokumentasi WVI AP Sentani)



Keenam korporasi ini juga menanggung biaya operasional dan pengadaan buku-buku. PT. Prudential Life Assurance melakukan renovasi pada perpustakaan di SD Inpres Komba, Distrik Sentani, dan renovasi besar terhadap ruang-ruang kelas di SD YPK Ifar Babrongko di distrik yang sama. Dengan renovasi tersebut, anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang lebih nyaman.

PT. Prudential Life Assurance juga membiayai pelatihan Active Joy and Effective Learning (AJEL) serta literasi tentang keuangan kepada guru-guru dari delapan sekolah di Kabupaten Jayapura antara lain dari SDN Inpres Kehiran, SDN Inpres Siboi, SD YPPGI 2 Sentani, SDN Inpres Dobonsolo, SD Inpres Kensio dan SD Kristen Permata. Pelatihan AJEL bertujuan meningkatkan kemampuan mengajar para guru.

Yang jelas, menurut Wangsit, anak-anak, guru dan orang tua mendapatkan manfaat yang banyak dari kerja sama Pemkab Jayapura, korporasi, dan WVI.

Anak-anak, guru dan orang tua mendapatkan manfaat yang banyak dari kerja sama Pemkab Jayapura, korporasi, dan WVI.

“Program ini masih akan berlangsung sampai empat tahun ke depan. Sekarang yang kami jumpai sehari-hari di lapangan adalah semangat anak-anak yang tinggi untuk belajar. Demikian juga para guru dan orang tua mereka,” jelasnya.

Sebanyak 480 anak telah merasakan manfaat dari perbaikan fasilitas belajar di dua sekolah, dan lebih dari 1.800 anak akan mendapatkan manfaat dari pelatihan literasi yang diberikan kepada 27 orang guru di sekolah-sekolah di Jayapura.

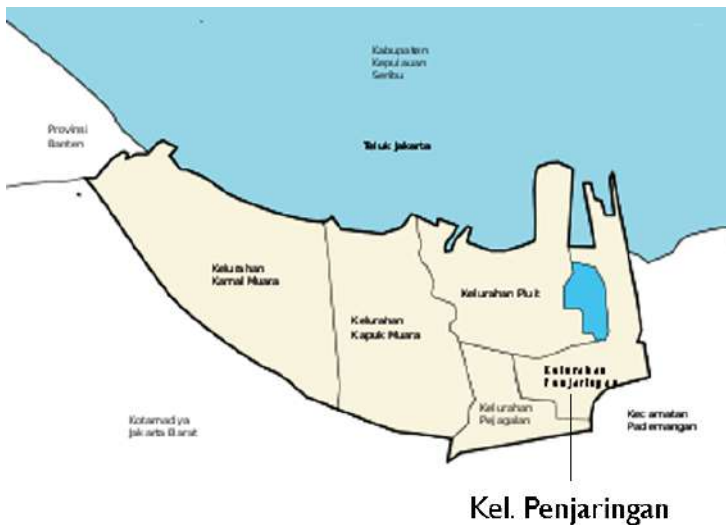


Anak-anak sedang belajar di perpustakaan yang baru direnovasi di SD Komba (Dokumentasi Kantor Pusat WVI Jakarta)



Murid SD Komba sedang menggambar di lantai perpustakaan yang baru (Dokumentasi Kantor Pusat WVI Jakarta)

“Kami sangat terbantu dengan sumbangan peralatan maupun pelatihan guru yang dilakukan oleh lembaga mitra yang dikoordinir WVI. Semoga kerjasama ini bisa terus dilanjutkan agar persoalan pendidikan di Kabupaten Jayapura bisa cepat selesai,” ujar Alpius Toam, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.***



“Kami berharap dengan tersedianya tempat ini, anak-anak bisa lebih memiliki kesempatan dalam mengekspresikan kreativitas mereka dalam seni, olah raga dan memberikan akses untuk belajar melalui buku-buku perpustakaan.”

Cho Kook Whan

CEO Hanwha Life Indonesia

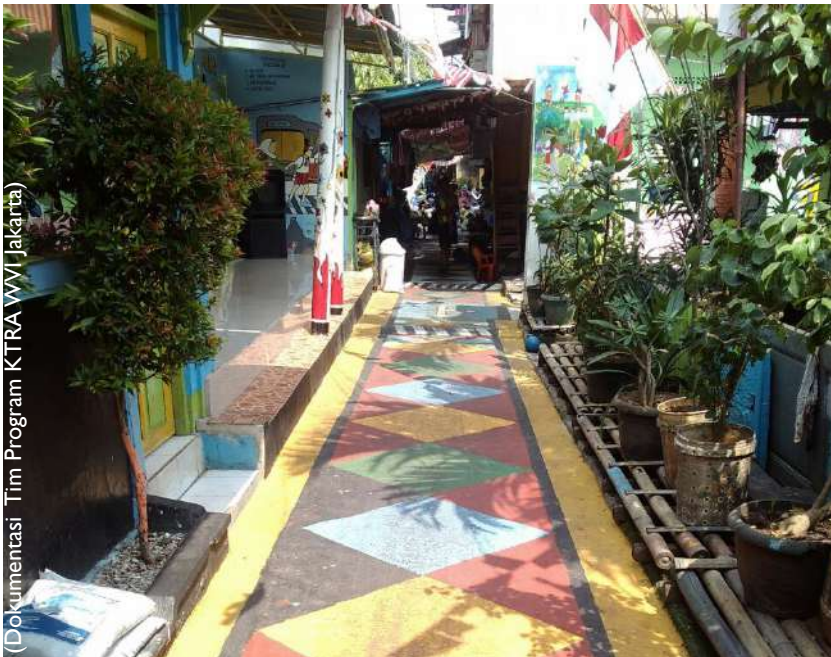
Perusahaan ini mendukung Wahana Visi Indonesia melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Jaka Teratai, Jakarta Timur

Praktik Cerdas dari Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta

Kampung Terpadu Ramah Anak (KTRA)

Menuju Kecamatan Penjaringan Layak Anak



(Dokumentasi Tim Program KTRA WVI Jakarta)

Pada tahun 2016 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Layak Anak. Warga berupaya mendukung pemenuhan hak dasar anak dengan menyiapkan wilayah beraktivitas yang layak bagi mereka.



Kecamatan Penjaringan dipilih karena memiliki tingkat kesenjangan wilayah yang tinggi. Pada kawasan itu berdiri tempat hiburan dan pemukiman komersial yang berkembang pesat, namun persis di seberangnya berjejal-jejal pemukiman padat penduduk.

Tak jauh dari pemukiman yang padat ini terdapat rel kereta api, dengan gubuk-gubuk di sampingnya. Di sanalah anak-anak bermain. Malam hari, bantaran rel berubah fungsi menjadi tempat transaksi lelaki hidung belang. Memang, tak jauh dari situ terdapat lokalisasi. Kehidupan malam ramai di sana.

Dengan kondisi seperti ini, Penjaringan menjadi salah satu wilayah yang tingkat kekerasan pada anak tinggi. Wahana Visi Indonesia (WVI) juga menemukan bahwa banyak remaja berisiko tertular PMS, diare pada balita dan anak-anak yang mengkonsumsi camilan yang tidak sehat. Sebagian besar penduduk Penjaringan adalah buruh pabrik. Para istri membantu perekonomian keluarga dengan berjualan. Sementara di daerah Muara Baru dan Muara Kamal, sebagian besar warga menjadi nelayan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2008 diketahui jika Jakarta Utara merupakan daerah paling kumuh dibandingkan tiga wilayah Jakarta lainnya. Wilayah Jakarta Utara itu, yakni Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Penjaringan menjadi salah satu wilayah yang tingkat kekerasan pada anak tinggi. WVI juga menemukan bahwa banyak remaja berisiko tertular PMS, diare pada balita dan anak-anak yang mengkonsumsi camilan yang tidak sehat.



Hasilnya, di RW 12 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, hanya 50,9 persen rumah yang ditinggali responden memiliki WC dan 65,3 persen responden tidak memiliki WC. Minimnya peran pemerintah dalam menyediakan WC umum turut menyumbang tingkat kekumuhan itu.

Karena itu, deklarasi sebagai Kecamatan Ramah Anak dengan menciptakan Kampung Terpadu Ramah Anak (KTRA) merupakan awal yang baik bagi Kecamatan Penjaringan untuk menciptakan ruang ramah anak selain Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta.

Memang wilayah Jakarta Utara menjadi wilayah kota yang memiliki jumlah RPTRA terbanyak pada skala Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini sudah memiliki 42 RPTRA dengan perincian 10 lokasi dibangun dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), satu dibangun melalui swadaya masyarakat dan 31 lokasi menggunakan dana APBD.

Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi pembangunan KTRA dilakukan terhadap empat Rukun Warga (RW). Keempat RW Ini ditargetkan sebagai lokasi percontohan. “Tetapi yang merespons dengan baik adalah warga di RW 13. Seluruh tokoh masyarakat dan kepala RW mendukung penuh adanya wilayah ramah anak di wilayah RW mereka,” kata Asih Silawati.

Kampanye dan sosialisasi tentang KTRA juga dilakukan kepada para pengurus RT, PKK, Karang Taruna dan organisasi masyarakat lainnya yang ada di wilayah Penjaringan. WVI selalu hadir hampir dalam setiap kegiatan masyarakat untuk menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan warga.



Selesai sosialisasi, pengurus RW dan RT mengadakan rapat. WVI diundang untuk kembali menjelaskan konsep “ramah anak” yang dapat diimplementasikan di wilayah mereka. Setelah melakukan koordinasi melalui sosialisasi ke pengurus RT, warga dalam rapat-rapat perencanaan menentukan konsep yang cocok untuk wilayah mereka. Setelah semua perencanaan terkonsep dengan baik, Pengurus RW menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta WVI untuk terus mendampingi dan terlibat dalam proses perwujudan KTRA.



Gerbang ucapan selamat datang di Kampung Ramah Anak Penjaringan, Jakarta Utara (Dokumentasi Tim Program KTRA WVI Jakarta)



Mural hasil kreasi warga yang mengubah wajah Kampung RW 13 Penjaringan Jakarta Utara menjadi lebih indah (Dokumentasi Tim Program KTRA WVI Jakarta)



Mural hasil kreasi warga yang mengubah wajah Kampung RW 13 Penjaringan Jakarta Utara menjadi lebih indah (Dokumentasi Tim Program KTRA WVI Jakarta)

Yang menarik adalah kehadiran kaum bapak dalam setiap acara sosialisasi KTRA. Pada saat perencanaan untuk menciptakan wilayah Ramah Anak, peserta rapat hampir sebagian besar kaum bapak. Demikian juga pada saat implementasi, sebagian besar kaum bapak terlibat dalam kegiatan mulai dari kerja bakti, pembuatan dinding pembatas untuk menutup akses ke rel kereta api, menciptakan ruang hijau dengan menanam tanaman, dan menciptakan wilayah yang lebih ramah anak melalui lukisan dan warna-warni dinding rumah. Para staf dari perusahaan Audit Pajak Sidharta & Registered Public Accountants (KPMG) sangat mendukung dalam proses pengecatan bersama masyarakat.



Sesuatu yang jarang didapati di lingkungan Penjaringan di mana pengasuhan anak biasanya diperankan oleh ibu. Tapi kali ini kaum bapak berperan luar biasa.

“Proses Sosialisasi dari Level RW hingga ke masyarakat membutuhkan waktu hampir 2 bulan, sementara proses penyusunan dan pembuatan konsep ramah anak sesuai kondisi membutuhkan waktu hampir 3 bulan, dan sekitar sebulan kemudian, masyarakat mulai menciptakan KTRA yang mereka sepakati. Manfaat dari program di atas dirasakan oleh sekitar 850 anak,” jelas Asih.

Yang menarik adalah kehadiran kaum bapak dalam setiap acara sosialisasi KTRA. Mereka dalam kerja bakti, pembuatan dinding pembatas, menciptakan ruang hijau, dan melukis dinding rumah.

Pembangunan fisik melibatkan peran serta masyarakat secara luas, baik Karang Taruna, perwakilan FA wilayah RW 13, Forum Pengusaha, serta anak-anak dilibatkan dalam pembangunan KTRA. Mereka turut dalam penentuan desain wilayah, pengecatan dan perapian wilayah.

Tidak hanya pembangunan fisik KTRA saja. Warga RW 13 juga

berkolaborasi melaksanakan program-program proanak seperti kegiatan Kelompok Belajar Anak (KBA), perpustakaan yang dikelola oleh warga serta pembentukan *youth center* untuk mendukung lahirnya *entrepreneurship* dari para pemuda.



Selain menciptakan lingkungan layak anak, program penguatan dari sektor lain juga dilakukan seperti peningkatan pelayanan Bank Sampah di wilayah RW 13, penguatan ekonomi rumah tangga dengan pembentukan ASCA (*Accumulative Saving Credit Association*) dan pengembangan usaha rumah tangga. Sektor-sektor yang saling terintegrasi ini diharapkan akan menjadikan KTRA sebagai pusat kegiatan masyarakat dan mendukung *grand design* KLA Provinsi DKI Jakarta.

Sektor-sektor yang saling terintegrasi ini diharapkan akan menjadikan KTRA sebagai pusat kegiatan masyarakat dan mendukung *grand design* KLA Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan yang terjadi dengan hadirnya KTRA ini dirasakan oleh masyarakat. “Sebelum adanya KTRA anak-anak dibiarkan bermain di jalan, kumpul di rel kereta api yang bersebelahan dengan wilayah RW, terpengaruh menghirup lem tanpa sepengetahuan orang tua, terlibat tawuran dan tidak ada tempat bermain anak karena pemukiman yang sangat padat. Namun setelah KTRA terbentuk, anak-anak bisa bermain, belajar, serta melakukan latihan menari,” kata Suprayetno, Ketua RT 06 RW 13.



Memberi Dampak

“Sebelum ada KTRA anak-anak bermain di jalan, kumpul di rel kereta api, menghirup lem tanpa sepengetahuan orang tua, terlibat tawuran dan tidak ada tempat bermain anak karena pemukiman sangat padat. Namun, setelah KTRA terbentuk, anak-anak bisa bermain, belajar, serta melakukan latihan menari.”

Semangat mewujudkan KTRA ini berdampak ke wilayah lain yaitu RW 10 Penjarangan. Melihat perubahan di RW 13, masyarakat RW 10 mulai menginisiasi KTRA dengan pembentukan Panitia KTRA, sosialisasi inisiatif pembentukan KTRA, rapat kerja untuk mengimplementasikan KTRA hingga akhirnya KTRA terbentuk. Dengan inisiatif itu, RW 10 sekarang sudah berhasil membangun fasilitas bermain anak, perpustakaan anak, dan peraturan jam belajar bagi anak sekolah.

Saat ini WVI sedang melakukan pendampingan terhadap wilayah RT lainnya untuk ikut menciptakan wilayah ramah anak di RT masing-masing. Selain mendampingi RW 13 sebagai *pilot project*, WVI juga mendampingi 2 RW lainnya yang tertarik begitu melihat hasil yang ada di RW 13, yakni RW 10 juga yang telah menghasilkan satu wilayah ramah anak dan dalam tahap perencanaan untuk implementasi pada RW 17.

Tujuan akhir WVI, kata Asih, adalah menciptakan ruang-ruang ramah anak, di mana anak bisa hidup dengan layak dan lebih baik. ***

Sekilas tentang WVI

Siapa Kami

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Diinspirasi oleh nilai-nilai Kristiani, kami mendedikasikan diri untuk bekerja sama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis dan gender. Sejak tahun 1998, WVI telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. WVI mengedepankan program pengembangan yang bersifat jangka panjang dengan menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berkelanjutan atau Area Program/AP selama 10-15 tahun melalui kantor operasional yang berada di wilayah dampingan WVI. Pada tahun 2017, 152.654 anak yang paling rentan menerima manfaat program-program WVI dan 84.213 anak didampingi WVI

Di Mana Kami Bekerja

Tahun 2017-2018, Wahana Visi Indonesia melayani 59 wilayah layanan di Indonesia, di 13 provinsi di seluruh Indonesia

Kontribusi

Bentuk kontribusi WVI terhadap Kota/Kabupaten Layak Anak adalah melalui program-program di bidang pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi.

Sorotan

Pengalaman lebih dari 20 tahun memberdayakan masyarakat
Mitra terpercaya World Vision Internasional
Program multisektor yang terintegrasi
Peraih Millenium Development Goals (MDGs Award)



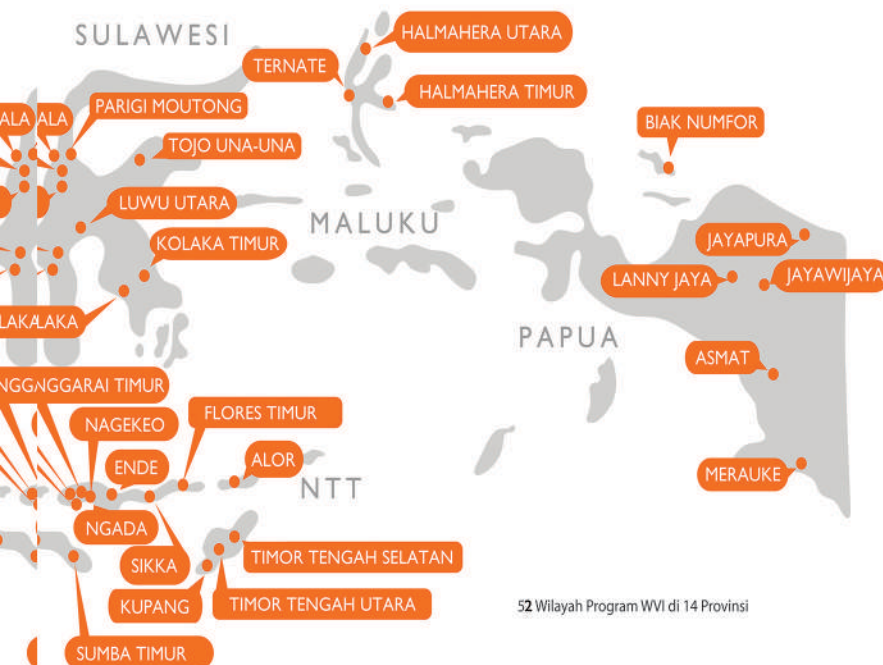
Wilayah P P WAHANA VISS Tahun Fiskal





Program INDONESIA 2018-2019

Wahana Visi
INDONESIA



“Visi kami untuk setiap anak,
hidup utuh sepenuhnya.
Doa kami untuk setiap hati,
tekad untuk mewujudkannya”



Anak-anak di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Foto: Adi Hutomo

**Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 No.09,
Pondok Aren, Jakarta 15228
Telp. +62 21 2977 0123**

www.wahanavisi.org



Wahana Visi Indonesia



@wahanavisi_ID

Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan World Fit for Children di tingkat internasional, serta UUD 45, UU dan Inpres terkait. Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/ kota pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah kabupaten/ kota.

Wahana Visi Indonesia (WVI) memandang program KLA sebagai inisiatif yang sangat baik sehingga harus didukung perwujudannya. Bentuk kontribusi WVI terhadap KLA adalah melalui program-program di bidang pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi pada semua daerah layanan WVI.

Di tingkat nasional, WVI ikut memfasilitasi keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap revisi indikator KLA, khususnya di klaster Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2017. Sementara di daerah, WVI telah memfasilitasi berbagai sesi pengembangan kapasitas daerah dalam memahami KLA, mendeklarasikan komitmen daerah menuju KLA, membangun gugus tugas dan rencana aksi, baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai desa.

Buku *Menuju Indonesia Layak Anak, Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak* berisi praktik cerdas WVI mendukung perwujudan KLA di tingkat nasional dan daerah. Buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi intervensi-intervensi yang berbasis bukti di wilayah masing-masing. Kisah-kisah inspiratif beserta kumpulan data pendukung dalam buku ini semoga dapat memicu lebih banyak aksi inovasi dan kreatif dari berbagai kalangan dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 sebagai kontribusi Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

sampai usia

2 tahun atau lebih